

Teuku Rezasyah

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA: ANTARA IDEALISME DAN PRAKTIK

HUMANIORA

PENGANTAR PENERBIT

Dalam perpolitikan nasional, ada tiga istilah yang tidak dapat dipisahkan, yaitu politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. *Politik luar negeri*, perangkat yang digunakan oleh negara kita untuk berhubungan dengan negara lain. Kebijakan politik luar negeri ini digunakan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan dan kepentingan nasional. Indonesia adalah negara berdaulat yang menganut politik luar negeri bebas aktif. *Hubungan luar negeri*, konsep interaksi yang dilaksanakan oleh sebuah negara dengan negara lain dengan syarat tidak menghilangkan kedaulatan negara yang bersangkutan. *Politik internasional*, politik antarnegara yang meliputi berbagai kepentingan negara-negara yang bersangkutan, dan proses interaksi antarnegara ataupun dengan organisasi internasional.

Dalam prakteknya, politik luar negeri Indonesia harus sesuai dengan konsep Pembukaan UUD 1945. Tujuan yang ingin dicapai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui kerja sama internasional adalah meningkatkan persaudaraan dan saling paham antarnegara di setiap kawasan; meningkatkan perdamaian internasional sebagaimana amana Pembukaan UUD 1945; mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan keselamatan NKRI; mewujudkan masyarakat yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan; dan mengembangkan kehidupan demokratis yang sesuai dengan dasar filosofis dan ideologis.

Sudah benarkah track-record negara kita dalam melaksanakan amanat UUD 1945, khususnya berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri? Inilah masalah yang menjadi sorotan utama buku ini. Salah satu kasus yang kemudian diangkat adalah sikap Singapura, khususnya berkenaan dengan sikap negeri Jiran itu yang tampak angkuh dan pongah, sedangkan posisi negara kita terkesan tidak memiliki kedaulatan. Salah satu bukti yang mungkin menjadi data adalah sikap Singapura yang tetap akan melakukan penimbunan laut untuk memperluas wilayah daratannya.

Lalu, bagaimana seharusnya tindakan yang dilakukan oleh negara kita sebagai negara berdaulat? Pembaca harus menelaahnya secara kritis. Penulis menyodorkan telaah yang sangat bernas dan cerdas, tentu sesuai dengan disiplin ilmunya yang menggeluti hubungan internasional.

Selamat membaca.

Penerbit

PENGANTAR PENULIS

KEPUSTAKAAN

- Kompas. 2006. 'Lee Hsien Loong: Sistem Politik Kami Sama Adilnya'. 26 April. Halaman
- UNDP. 2001. Indonesian Human Development Report. Jakarta: UNDP.
- Annual Report 2004-2005*, Department of Foreign Affairs and Trade. Canberra: Government Printing Office.
- Chareonwongsak, Kriengsak. 2003. 'Insights into Thailand's Post-Crisis Economy'. Bangkok: Institute of Future Studies for Development (IFD) and Success Media Co., Ltd.
- Cho, Dong-sung. 1996. 'Overseas Business Ventures'. Dalam Korea Focus on Current Topics. Vol. 4, No. 1 (Jan-Feb). Hal: 124-126.
- Kompas, 21 April 2005. 'Kadin Fokus Pasar yang Baru di Afrika'.
- Lew, Seok-choon. 1997. 'Confucian Capitalism: Possibilities and Limits'. Dalam Korea Focus on Current Topics. Vol. 5, No. 4 (July-August). Hal: 80-98.

- Maharaj, Raksha. 2004. Asia Business Briefing. (December). Emerging Markets Focus Internet portal Asia Business Briefings.
- Padayachee, Vishnu. 2000. Indian Business in South Africa After Apartheid: Old and New Trajectories From Comparative Studies in Society and History. Durban: University of Kwazulu Natal
- Park, Won-bae. 1997. 'Failures of Second-Generation CEOs'. Dalam Korea Focus on Current Topics. Vol. 5, No. 3 (May-June). Hal: 66-75.
- Patterns of Africa-Asia Trade and Investment: Potential for Ownership and Partnership*. Oktober 2004. The World Bank Study on Africa-Asia Trade and Investment Realties.
- Report On Indian Head of Mission/ Commercial Representatives in Sub Saharan Countires*. 2003. Ministry of Commerce and Industry Department of Commerce Government of India.
- White Paper on International Economy and Trade White Paper on International Economy and Trade 2005*, Ministry of Economy, Trade and Industry.
- Yang, Chang-soo. 1997. 'Globalization and Foreign Languages'. Dalam Korea Focus on Current Topics. Vol. 5, No. 1 (Jan-Feb). Hal: 162-164.
- <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/statistic/ie/200602/20060201468344.html>
- <http://www.matrade.gov.my/matrade/matradeMedia122005.htm>
- <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/statistic/foreigntradecooperation/200407/20040700249030.htm>.
- Admiral William J. Fallon, Commander. 2006. Statement before The Senate Armed Forces Committee on US Pacific Command Posture. Washington. 7 Maret.
- Asia-Pacific Defense Reporter. 2004. *Indian Carrier Deal*. (January). Hal. 6.
- Asia-Pacific Defense Reporter. 2004. *Singapore's New Frigate Takes To The Waters*. (January). Hal. 8.
- Djalal, Hasyim. 2006. *Maritime Security in South East Asia: Addressing the Concerns*. Makalah disampaikan dalam Indodefence Conference 2006. Maritime Security: Challenges and Prospects for Regional Cooperation. Jakarta International Expo-Kemayoran. Jakarta, 23-24 November. Hal: 1-20.
- Gupta, Manoj. 2006. *Maritime Cooperation?*. Makalah disampaikan dalam Indodefence Conference 2006. Maritime Security: Challenges and Prospects for Regional Cooperation. Jakarta International Expo-Kemayoran. Jakarta, 23-24 November. Hal: 1-6.
- Herryanto, Eris. 2006. *Defense Cooperation: A New Paradigm*. Makalah disampaikan dalam Indodefence Conference 2006. Maritime Security:

- Challenges and Prospects for Regional Cooperation. Jakarta International Expo-Kemayoran. Jakarta, 23-24 November. Hal: 1-9.
- Ho, Joshua. 2006. *Security of Regional Sea Lanes*. Makalah disampaikan dalam Indodefence Conference 2006. Maritime Security: Challenges and Prospects for Regional Cooperation. Jakarta International Expo-Kemayoran. Jakarta, 23-24 November. Hal: 1-34.
- Hotland, Tony dan Ridwan Max Sijabat. 2006. *RI Needs to Develop Local Defence Industry, SBY Says*. The Jakarta Post. 23 November. Hal. 2.
- Jane's Navy International. 2003. *Second RMN Patrol Vessel En Route*. (November). Hal. 8.
- Kompas. 2006. *Persenjataan TNI Akan Dimodernisasi*. 23 November. Hal. 2.
- Kotani, Tetsuo. 2006. *The Development of Postwar Japanese Sea Power: Implications for Regional Maritime Cooperation*. Makalah disampaikan dalam Indodefence Conference 2006. Maritime Security: Challenges and Prospects for Regional Cooperation. Jakarta International Expo-Kemayoran. Jakarta, 23-24 November. Hal: 1-8.
- Mangindaan, Robert. 2006. *Indonesia Responses to Maritime Security Cooperation*. Makalah disampaikan dalam Indodefence Conference 2006. Maritime Security: Challenges and Prospects for Regional Cooperation. Jakarta International Expo-Kemayoran. Jakarta, 23-24 November. Hal: 1-5.
- Permal, Sumarthy. 2006. *The Straits of Malacca: Safety, Security and Strategic Issues*. Makalah disampaikan dalam Indodefence Conference 2006. Maritime Security: Challenges and Prospects for Regional Cooperation. Jakarta International Expo-Kemayoran. Jakarta, 23-24 November. Hal: 1-25.
- Soebijanto, Slamet. 2006. *Maritime Security in South East Asia: Indonesian Initiatives*. Makalah disampaikan dalam Indodefence Conference 2006. Maritime Security: Challenges and Prospects for Regional Cooperation. Jakarta International Expo-Kemayoran. Jakarta, 23-24 November. Hal: 1-5.
- Thow, Jonathan. 2006. *Maritime Security: Challenges and Prospects for Regional Cooperation*. Makalah disampaikan dalam Indodefence Conference 2006. Maritime Security: Challenges and Prospects for Regional Cooperation. Jakarta International Expo-Kemayoran. Jakarta, 23-24 November. Hal: 1-12.
- Wilson, Andrew R. 2001. *Chinese Seapower In The Twenty First Century: Aspiration and Limitation*. Dalam Till, Geoffrey (eds). Seapower At The Millenium. Gloucestershire: Sutton Publishing.

Bagian Pertama BERCERMIN DARI SINGAPURA

I

POTRET SINGAPURA: SEBUAH PERBANDINGAN

Banyak sekali kritik yang mengemuka atas politik luar negeri Republik Indonesia dewasa ini. Mereka yang pragmatis, pada umumnya, mengidealkan sebuah model yang dikembangkan pada masa Presiden Soeharto yang sentralistis. Saat “masa emas” itu, semua kebijakan luar negeri benar-benar terencana yang diawaki oleh personil berkualitas dan berintegritas tinggi sehingga mampu mengambil manfaat dari berbagai perkembangan yang terjadi dalam struktur global. Model ini dapat dikatakan berhasil hingga terjadinya krisis ekonomi dan moneter di kawasan Asia Tenggara pada 1997.

Sebaliknya, mereka yang idealis mengambil contoh kebijakan yang dibuat pada masa awal kepemimpinan Presiden Soekarno. Saat itu, Presiden Soekarno tidak menghiraukan konteks sengketa Timur-Barat. Ia justru berhasil memunculkan sebuah jalan alternatif, yakni kepemimpinan dalam Dunia Ketiga. Model ini berhasil pada awal 1960-an. Salah satu bukti keberhasilannya, Indonesia berhasil merebut Irian Barat dari kekuasaan pemerintah Belanda.

Secara teori, perdebatan akademis semacam ini dapat dibenarkan. Di dalamnya terjadi pertemuan, bahkan “peperangan”, antara idealisme dan realisme. Dalam prosesnya, pemerintah dan masyarakat Indonesia mampu mengambil sebuah jalan tengah (moderat) sehingga mampu mengambil manfaat maksimal dari perkembangan yang terjadi demi tercapainya kepentingan nasional. Dalam kenyataannya, kita menghadapi sebuah dilema, yakni ingin mengubah keadaan di tengah-tengah segala keterbatasan yang terus menggelayuti sistem perpolitikan nasional. Berkaitan dengan itu, naskah ini dirancang sedemikian rupa agar kita dapat mengenali masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita. Dengan begitu, kita sadar bahwa perlu sebuah terobosan kolektif yang cerdas dan bernas untuk menjawab tantangan tersebut.

Mengapa Harus Singapura?

Singapura adalah negara tetangga yang kerap kali menjadi harapan kita tentang bagaimana sebuah pembangunan hendaknya dijalankan di negara ini. Masalah ini tidaklah aneh karena Singapura kerap kali menjadi sasaran kunjungan dinas kalangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun tujuan wisata kalangan masyarakat luas di dalam negeri. Memang, kunjungan ke negara Singa ini relatif terjangkau. Jarak tempuh pun tidak terlalu lama karena kita sudah tiba dalam hitungan dua jam penerbangan.

Sepulang dari negara kepulauan ini, semua aktor yang telah disebutkan di atas, umumnya, memiliki pendapat yang nyaris sama. Apa sajakah itu? *Pertama*, mereka ingin menata wilayah Indonesia menjadi sebersih, seteratur, setertib, secantik, semakmur, dan seaman Singapura. Memang, kita tidak akan menemukan sampah yang menggunung dan mengundang penyakit di Singapura. Tidak sedikit pula yang berkeinginan kuat untuk menjadikan birokrasi kita setangguh birokrasi di Singapura. Para pegawai birokrat berjumlah sedikit, namun berdisiplin tinggi. Mereka juga padat teknologi informasi sehingga pelayanan

publik menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah yang bercorak modern. Pelayanan publik pun terselenggara secara cepat dan tuntas.

Kedua, mereka ingin mengubah jalan raya yang dipenuhi pengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan kendaraan tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menjadi terbebas dari kecelakaan lalu lintas. Lebih jauh lagi, mereka juga berobsesi bahwa berbagai kawasan tua yang kumuh dan terbengkalai, serta tidak berdaya saing secara ekonomi itu harus diubah menjadi kawasan pariwisata yang mengirimkan pundi-pundi uang seperti “Little India” yang terkenal ke seluruh dunia. Mampukah kita beranjak ke sana sebagaimana yang mereka impikan?

Hemat kami, jawaban atas persoalan negeri tidak terletak pada sumber keuangan yang sanggup kita pinjam sedemikian rupa. Tidak juga pada tenaga ahli yang mungkin bisa disewa, atau rekayasa peraturan yang mungkin bisa dilakukan, ataupun kepemimpinan yang digerakkan dengan tangan besi untuk mencapai tahapan seperti yang sudah dimiliki oleh Singapura. Bukan itu jawaban yang harus dikeluarkan. Jujur saja, keberhasilan Singapura terletak pada ketahanan nasionalnya. Mereka memiliki ketahanan nasional yang baik karena terdapat kesepahaman antara semua kekuatan politik bangsa dengan pemerintah yang berkuasa. Kondisi inilah yang secara otomatis memengaruhi manajemen negaranya. Demikian pula penanganan politik luar negeri yang diterapkannya yang, langsung atau tidak langsung, turut memengaruhi pandangan mereka atas Indonesia.

Jelasnya, Singapura merupakan negara dengan kepercayaan-diri (*self-confidence*) yang sangat tinggi. Mereka terus belajar dari krisis yang dihadapinya pada masa lalu. Dengannya, mereka selalu mampu mengambil manfaat terbaik dari situasi apa pun yang terjadi di lingkungan internasional. Sepanjang kepemimpinan Lee Kuan Yew (1959-1990), pemerintahan Singapura berjalan di atas prinsip-prinsip “demokrasi otoriter”. Konsep kepemimpinan “demokrasi otoriter” adalah sebuah pemerintahan yang sangat profesional dalam bekerja. Ia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang sangat kharismatis. Prinsip *leadership*nya sangat sanggup mengelola negaranya secara modern. Walaupun peranan pemerintah sangat dominan, bahkan seringkali dikritik sebagai totaliter, namun, model pembangunan yang khas Singapura ini mampu mensejahterakan rakyatnya. Kemampuan mensejahterakan rakyat bertolak ukur dari keberhasilan ekonomi yang tidak terbantahkan, bahkan dengan standar negara maju sekalipun. Bagaimana dengan negara kita yang katanya sering diimpikan sebagai negara *gemah ripah lohjinawi* ini?

Sudah Dimanakah Singapura?

Pada bagian awal sudah disebutkan bahwa Singapura dengan konsep kepemimpinan “demokrasi otoriter”nya telah berhasil mensejahterakan rakyatnya. Lalu, bagaimana potret yang sebenarnya tentang indikasi keberhasilan Singapura?

Beberapa bukti yang terekam dapat kami sebutkan berikut ini. Kami berharap, “potret bening” tentang keberhasilan Singapura ini dapat menyadarkan kita bahwa negara kecil ini adalah mitra yang mau tak mau kekuatannya harus dipelajari dengan pijakan hati yang jernih dan jujur.

Di *bidang diplomatik*. Hingga 2000, reputasi Singapura dibuktikan oleh kecakapan dan kemampuannya melakukan hubungan diplomatik dengan 158 negara. Singapura juga mampu menangani diplomasi multilateral dengan: 1) *Association of South-East Asian*

Nations (ASEAN); 2) *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC); 3) *Asean Regional Forum* (ARF); 4) *Asia-Europe Meeting* (ASEM). Dengan sumber daya manusia (SDM) Singapura yang sangat terbatas, semua kegiatan tersebut dikoordinasikan melalui 37 misi diplomatik yang tersebar di seluruh dunia¹. Patut diketahui, dibandingkan dengan negara-negara pendiri ASEAN lainnya, misi diplomatik yang dikembangkan oleh Singapura termasuk yang terkecil. Namun, uniknya, misi diplomatik yang kecil tergolong ini paling aktif dalam mengikuti kegiatan nasional dan internasional, di mana pun mereka ditempatkan.

Di *bidang pertahanan*. Secara konsisten, Singapura mengikuti model pertahanan Israel. Dengan hanya berawakkan 50.000 tentara profesional, namun didukung oleh 250.000 penduduk yang terlatih. Setiap warga negara yang sudah berusia 18 tahun ke atas wajib mengikuti wajib militer antara 24-30 bulan. Wajib militer ini kemudian dilanjutkan oleh latihan teratur hingga mereka berusia 45 tahun. Singapura memiliki akses pelatihan militer di Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Brunei, New Zealand, Perancis, Taiwan, dan Thailand. Untuk menghadapi kemungkinan terburuk, Singapura mengandalkan sistem persenjataan modern, sistem pelatihan tempur modern, serta kemampuan membuat senjata secara mandiri. Pada 1999, anggaran pertahanan Singapura tiga kali lipat lebih besar daripada anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpenduduk 210 juta.²

Di *bidang sumber daya manusia*. Masyarakat Singapura berjiwa ekonomi yang sangat kuat. Jiwa ekonomi ini disertai oleh kemampuan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berstandar internasional. Kemampuan dasar inilah yang memungkinkan Singapura menjadi negara terkemuka di bidang jasa perhubungan, terutama sekali dalam aspek-aspek yang berhubungan dengan transportasi laut dan udara³. Karena sistem pendidikan yang digunakan menggunakan konsep dan metode modern, sudah merupakan pengetahuan umum bahwa mahasiswa Singapura yang kuliah di luar negeri umumnya kritis, cekatan, dan kompak. Bandingkan dengan sistem pengembangan sumber daya manusia negeri kita.

Di bidang politik luar negeri, Singapura mempraktikkan sebuah model yang sangat khas. Kekhasan ini terletak pada ciri-ciri berikut.

1. Pragmatis dengan menghargai perkembangan apa pun seperti apa adanya, dan terbebas dari ideologi atau dogma manapun;
2. Waspada atas perubahan apa pun di tingkat dunia, seperti perubahan struktur politik dan ekonomi global;
3. Perencanaan ke depan dilakukan melalui berbagai pengkajian skenario masa depan sehingga memaksa Singapura untuk terus bertahan dalam situasi terburuk sekalipun; dan
4. Kemampuan meminjam kekuatan lawan, seperti mengangkat Konsul Kehormatan di wilayah-wilayah yang belum ada Kedutaan Besar Singapura, serta Duta Besar keliling yang tidak tinggal di Singapura⁴.

Di bidang pemerintahan, Singapura memiliki tata pemerintahan yang sangat baik. Hal ini dibuktikan oleh eksistensi unsur-unsur: a) kepemimpinan yang sangat berkompeten dan berani; b) kaderisasi yang dilakukan secara terus menerus; c) sinergi antara pemerintah,

¹ Leifer, Michael. 2000. *Singapore's Foreign Policy: Coping With Vulnerability*. New York: Routledge. Hal. 3.

² Leifer, 2000. *Singapore's Foreign Policy*. Hal. 16.

³ Leifer, 2000. *Singapore's Foreign Policy*. Hal. 17.

⁴ Koh, Tommy. 1998. *The Quest for World Order: Perspectives of a Pragmatic Idealist*. Singapore: The Institute of Policy Studies. Hal. 215.

buruh, dan manajemen; d) kecenderungan mengambil keputusan secara konsensus dengan melibatkan masyarakat luas⁵.

Perkembangan Singapura yang sangat mencengangkan itu, tak urung, telah menarik hati banyak pengamat dan pemimpin dunia. Pada umumnya, komentar beberapa tokoh dunia itu berkomentar sangat positif. Bagi mereka, perkembangan Singapura selama dipimpin oleh Lee Kuan Yew (1959-1990) mengalami perkembangan yang spektakuler.

Mantan Menteri Luar Negeri Thailand, Siddhi Savetsila, menyebut perkembangan yang mencengangkan itu sebagai “*How to turn a crisis into positive benefit distinguishes an able statesmen from the ordinary*”. Sementara itu, Tun Daim Zainuddin, Menteri Keuangan Malaysia (1984-1991) menyebutnya sebagai: “*Lee’s vision, astute political judgement and strategy turned Singapore from a trading post into the successful thriving nation that is today, respected by others*”⁶.

Jelas sekali terlihat bahwa pemimpin puncak Singapura masa itu, dan juga kini, tidak hanya mampu menanggulangi krisis. Mereka juga memiliki visi dan strategi jangka panjang yang terencana. Pada tataran implementasi ada kekompakan yang dilaksanakan oleh semua aktor di dalam negeri sehingga menjadikan negara ini terpuji di hadapan negara lainnya. Bagaimana dengan kita?

II

MENGAPA KITA BELUM SEPERTI SINGAPURA?

Secara teori, sebuah kinerja yang baik hendaknya mengakar di semua lini kekuatan yang hidup dalam masyarakat, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Karena kedudukan dan posisi Indonesia sebagai negara berkembang, tidak ada salahnya jika kita merujuk pada pengalaman serupa yang pernah dialami oleh sesama negara berkembang, terutama sekali negara yang telah berhasil melewati status ini.

Ada baiknya pula jika kita mengamati pemikiran yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Singapura. Harus diakui, di dunia ini, tidak ada sistem politik yang lebih baik atau lebih buruk. Sikap yang seharusnya muncul adalah sikap terbuka sehingga kita mengakui bahwa kemampuan sistemlah yang dapat mencapai tugas pokoknya. Penjelasan ini dikemukakan dalam *The Straits Times*, edisi 25 April 2006.

Setelah kami mengkaji secara lebih saksama, apa yang disebutkan oleh *The Straits Times* itu dapat disarikan sebagai berikut.

Sistem politik sama adilnya dengan yang Anda bisa temukan di banyak negara lain dalam hal bagaimana Anda harus bisa: a) Tampil; b) Memiliki pandangan; c) Bisa mengorganisasi seluruh potensi; d) Memobilisasi; dan e) Menggugah keikutsertaan orang lain. Untuk semua ini, kita tidak membutuhkan banyak uang atau kekuasaan untuk bisa menggerakkannya.⁷

⁵ Koh, 1998. *The Quest for World*. Hal. 208.

⁶ Yew, Lee Kuan. 2000. *From Third World To First, The Singapore Story: 1965-2000 (Memoirs of Lee Kuan Yew)*. Singapore: Singapore Press Holdings. Komentar diatas termuat dalam bagian ‘About the author and his memoirs’, pada bagian sampul dalam.

⁷ *Kompas*. 2006. ‘Lee Hsien Loong: Sistem Politik Kami Sama Adilnya’. 26 April. Halaman 10.

Gambaran yang dikemukakan oleh *The Straits Times* tampak jelas adanya sebuah pesan bahwa pemerintah di belahan bumi manapaun hendaknya mampu bekerja keras untuk melibatkan peran-serta masyarakat di dalam semua program pembangunan yang digagas oleh pemerintah. Pemerintah harus menjadikan anggota masyarakatnya sebagai subjek, bukan objek dalam pembangunan. Sebagai subjek, masyarakat turut dilibatkan secara proaktif untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. Dengan begitu, seluruh warga-masyarakat akan memiliki rasa tanggung jawab atas program pembangunan yang dilaksanakan.

Struktur Masyarakat Indonesia dan Perubahan Kontekstual

Untuk konteks Indonesia, idealnya, kita memiliki koordinasi di antara aktor-aktor nasionalnya seperti pemerintah di tingkat pusat dan daerah, masyarakat luas, dunia usaha, kalangan pendidikan, serta kalangan Legislatif. Masalahnya, mampukah semua aktor tersebut bekerja sama secara baik sehingga menghasilkan *out-put* yang *secanggih* yang dihasilkan oleh Singapura? Rumusan ini sulit dilakukan. Mengapa? Karena lain halnya dengan di Singapura, kekuatan-kekuatan nasional yang ada di Indonesia, pada umumnya, bergerak sendiri-sendiri, tanpa koordinasi. Bahkan, kesan yang muncul, pejabat yang satu mencari popularitas dirinya untuk meraup keuntungan berupa nama yang terkenal sehingga bisa terpilih kembali dalam periode pemerintahan berikutnya. Jelas sekali, tidak sedikit pejabat yang berpandangan pragmatis atas posisi-kedudukannya sebagai pengarah masyarakat.

Karena struktur masyarakat Indonesia yang sangat parokhial, yakni sebagian besar masyarakatnya berpendidikan rendah dan sulit diorganisir, tanggung jawab terbesar sebenarnya terletak di tangan dan pundak pemerintah. Namun, dalam kenyataannya, pemerintah sendiri menghadapi kesulitan. Hampir semua kondisi di lapangan mengandung resiko ketidak-stabilan yang teramat tinggi yang sama sekali tidak pernah dialami oleh pemerintah dan masyarakat Singapura. Dengan kata lain, sehebat apa pun komitmen yang telah dibuat oleh pemerintah untuk bekerja, seideal apa pun komposisi kabinet yang dibentuk, serta secanggih apa pun strategi jangka panjang yang telah disusun dan disiapkan, tetap saja tidak akan berjalan dengan baik. Mengapa? Ini terjadi karena sangat beratnya kondisi domestik yang dihadapi oleh negara kita.

Beberapa aspek berikut merupakan perkembangan jangka panjang yang berhasil kami temukan hingga tengah 2007. Inilah yang kami sebut kondisi domestik yang dihadapi oleh bangsa ini. Selanjutnya, kami akan mengidentifikasi secara lebih rinci melalui konteks yang amat dipahami oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Beberapa hal mendasar yang sering menjadi kendala adalah masalah ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, serta ideologi.

1. Konteks Ekonomi

Di hadapan anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Presiden RI, Dr. Susilo Bambang Yudhoyon, dalam sambutannya mengatakan:

Harus diakui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2006 baru tumbuh sekitar 4,59%. Lebih lambat dibandingkan triwulan I 2005 yang tumbuh sekitar 6,25%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2006 disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat, melambatnya pertumbuhan investasi, berlanjutnya *global economic imbalance* (ketidakseimbangan ekonomi global), serta harga minyak di pasar internasional yang masih tetap tinggi dan cenderung meningkat. Dari sisi moneter, selama triwulan I 2006, beberapa indikator makro justru menunjukkan perkembangan yang positif. Hal itu ditandai oleh penguatan nilai tukar rupiah dari Rp 9.830/USD pada akhir Desember 2005 menjadi Rp 9.075/USD pada akhir Maret 2006. Demikian pula peningkatan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada periode yang sama, dari 1.162,64 menjadi 1.332,97. Tingkat inflasi pada periode ini, juga rendah, yakni hanya sekitar 1,98%.

Secara umum, perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa dampak lanjutan kenaikan harga BBM pada Oktober 2005. Kenaikan harga BBM ini memicu penurunan daya beli masyarakat dan kinerja sektor industri secara keseluruhan sehingga tingkat investasi riil juga menurun. Kenaikan harga BBM juga memicu otoritas moneter menerapkan *tight money policy* (kebijakan uang ketat) berupa kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Akibatnya, ekspansi kredit perbankan juga sangat rendah karena faktor resiko usaha meningkat.

Faktor eksternal lebih disebabkan oleh ketidakseimbangan ekonomi dan kecenderungan kenaikan tingkat harga minyak dunia. Ketidakseimbangan ekonomi disebabkan oleh defisit neraca perdagangan Amerika Serikat yang mencapai USD 800 miliar sehingga menekan dolar AS. Demikian pula, krisis minyak yang disebabkan oleh perubahan perilaku beberapa negara industri besar untuk memperbanyak persediaan minyak di dalam negeri, krisis nuklir Iran, dan beberapa konflik di beberapa produsen minyak.

Kita ingin, pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan perubahan-perubahan yang dinamis. Untuk itu, forum koordinasi antara otoritas moneter dan otoritas fiskal, serta pemegang kebijakan sektor riil di instansi sektoral terkait diminta untuk terus ditingkatkan agar terwujud nilai rupiah yang terkendali, perbaikan iklim investasi, dan mendapatkan investasi langsung. Demikian pula perbaikan indikator ekonomi moneter dan kinerja sektor perbankan perlu terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan (Sambutan Presiden RI pada Pembukaan Kongres XVI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Manado, 18 Juni 2006).

Hemat kami, secara konseptual, saat ini, pemerintah menghadapi tantangan yang sangat berat. Tantangan itu disebut berat kami tantangan yang harus dihadapi sudah mengental dan melembaga. Di sektor industri, pemerintah sulit sekali melawan para pemilik modal, baik dari dalam maupun luar negeri. Ini terjadi karena para pemodal itu mengunggulkan penggunaan teknologi maju dan menuntut ketersediaan lahan yang dalam prosesnya merusak tata ruang dan wilayah. Mereka juga mengurangi lahan produktif.

Terbatasnya pemahaman Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di kalangan pemerintah dan masyarakat memungkinkan kalangan dunia usaha melakukan ekspansi ekonomi tanpa kendali. Akibat yang kemudian terjadi dan ditanggung oleh masyarakat adalah semakin berkurangnya jumlah lahan produktif bagi pertanian, perkebunan, dan perikanan. Contoh yang paling sering muncul adalah terjadinya penjarahan hutan (*illegal logging*) dan berbagai tindak kejahatan yang berhubungan dengan aspek-aspek perizinan, pengawasan, dan pengalihfungsian lahan.

Pada saat yang sama, krisis ekonomi dan moneter telah memperlemah kontrol pemerintah atas berbagai aktivitas ekonomi dari hulu hingga hilir. Di sisi lain, kalangan swasta nasional dan internasional semakin berpeluang menguasai sumber-sumber ekonomi nasional. Padahal, penguasaan mereka atas sumber-sumber ekonomi itu sama sekali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat umum.

Perpindahan penduduk dalam jumlah besar menuju wilayah perkotaan dan pusat-pusat industri (urbanisasi) telah memperburuk potensi ekonomi di daerah pedesaan, pesisir, dan pegunungan. Arus ini, umumnya, dilakukan oleh mereka yang tingkat pendidikan dan pemahaman hukumnya sangat terbatas. Padahal, mereka memiliki tingkat kebutuhan ekonomi yang tidak terbatas. Lemahnya daya saing mereka (*bargaining position*) di lingkungan yang baru ini cenderung menimbulkan berbagai kerawanan baru di perkotaan. Lalu, konflik sosial pun sulit dihindari. Padahal, konflik sosial inilah yang menyebabkan pengeluaran biaya sosial (*social cost*) yang lebih tinggi.

Sementara itu, masyarakat juga tidak memiliki daya saing ekonomi. Inilah yang telah menyebabkan serbuan dan semakin membanjirnya berbagai produk impor, terutama sekali tekstil dan peralatan rumah tangga. Produk impor itu, bahkan, tersedia secara *overloaded* dengan harga yang sangat murah, berkualitas dan massal sehingga melumpuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di dalam negeri. Padahal, kita tahu, usaha yang dikembangkan oleh yang Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu melibatkan warga masyarakat dalam jumlah yang sangat besar.

Penyakit sosial yang sudah melembaga adalah korupsi. Seperti diketahui, status Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia sudah sangat terkenal. Bahkan, negara kita dikenai status sebagai "*country risk*" (negara beresiko). Tentu saja, status ini sangat tidak menguntungkan. Mengapa? Karena status ini telah memperkecil peluang untuk menerima investasi asing. Sebaliknya, pada saat yang sama, kita mengalami kesulitan untuk mengawasi keluarnya modal asing yang sudah tertanam di sini, terutama sekali yang dikategorikan sebagai "portofolio investment".

Indonesia juga seringkali terlambat dalam memanfaatkan sumber energi alternatif. Sikap tidak cepat tanggap inilah yang telah meningkatkan harga produksi kebutuhan pokok masyarakat semakin meningkat, memperlemah daya saing Usaha Kecil dan Menengah, serta meruntuhkan ketahanan rumah tangga. Di sisi lain, rendahnya infrastruktur telematika di tingkat pemerintah, swasta dan masyarakat atas informasi pemasaran produk Indonesia di luar negeri. Rendahnya infrastruktur telematika inilah yang mengakibatkan penumpukan produk berkualitas ekspor di dalam negeri sehingga menimbulkan instabilitas harga atas produk sejenis.

Memang, negara kita mengalami kemajuan transportasi dan industrialisasi. Namun, kemajuan itu terjadi secara tidak terkendali dan tidak dilakukan antisipasi dini sehingga mencemarkan lingkungan, mengurangi tersedianya sumber daya air, meningkatkan limbah industri dan rumah tangga yang tentu saja menimbulkan berbagai praktik ekonomi biaya tinggi (*high cost economic*).

Beberapa indikasi lain yang sudah melembaga itu sebagai berikut.

1. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah meningkatkan persaingan antara kelompok bermodal kuat melawan mereka yang bermodal lemah. Persaingan itu terjadi untuk memperoleh akses kredit dan fasilitas ekonomi. Salah satu resiko

politik yang dikuatirkan saat ini adalah semakin tajamnya jarak antara kelompok ekonomi lemah dan kelompok ekonomi kuat.

2. Pemerintah semakin tidak mampu mendanai proyek pembangunan berbasis kerakyatan seperti pembangunan rumah rakyat dengan harga terjangkau, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan rendah, serta anggota TNI dan Polri di tingkat bawah Perwira Pertama.
3. Belum lancarnya proses intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit mikro kepada para pengusaha sektor usaha kecil dan menengah, termasuk mekanisme perbantuan bagi para petani untuk meningkatkan produksi pangan, serta bantuan bagi nelayan di daerah pesisir untuk mengembangkan teknologi perikanan.
4. Masih berlanjutnya sengketa perburuhan di berbagai tingkatan industri yang diperburuk oleh belum adanya kesepakatan dan kesepakatan di tingkat pemerintah, pengusaha, dan para buruh. Kondisi ini menjadikan sektor ekonomi Indonesia rentan dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

2. Konteks Politik

Secara politik, pemerintah masih menghadapi berbagai kecenderungan berikut yang sangat akut. Sangat pesatnya reformasi telah mengubah keseimbangan dalam pemerintahan, dari yang sebelumnya lebih berat atau lebih berpihak pada peran eksekutif menjadi lebih berat pada peran legislatif. Sebagai dampaknya, pemerintah mengalami kesulitan yang sangat parah ketika ia harus menciptakan kebijakan publik yang berjangka panjang. Ini terjadi karena pemerintah harus terlebih dahulu melampaui berbagai konsesi lintas partai dan lintas fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Jelas sekali, perkembangan ini sangat mempersulit posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berasal dari partai minoritas, Partai Demokrat. Bagaimanapun, posisi sebuah partai yang relatif kecil (minoritas), sekalipun memiliki keterikatan emosional yang sangat kuat untuk pendukung pemerintahan, tetap saja, pemerintahan mengalami kesulitan ketika ia memperjuangkan program-program pembangunan yang dijanjikannya saat pemilu.

Kita seringkali menemui kenyataan di lapangan bahwa semangat otonomi daerah (Otda) dilaksanakan secara membabi-butakan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota di beberapa daerah. Kondisi yang tidak kondusif ini telah memaksa para aktor pelaksana daerah mengundang masuk kalangan swasta nasional, bahkan asing, untuk melakukan investasi, terutama sekali dalam infrastruktur. Sejalan dengan ego-sektoral yang semakin meningkat, mereka cenderung melupakan perlunya berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Di sisi lain, inilah yang semakin memperparah keadaan, pemahaman atas seluk-beluk pembangunan yang sangat teknis dan berkonsekuensi hukum jangka panjang jarang dipahami oleh pelaksana di lapangan.

Percepatan pemekaran provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan secara cepat dan tanpa perencanaan yang sistematis itu telah melahirkan banyak wilayah administrasi yang baru sehingga mengundang perebutan infrastruktur dan aset daerah. Kondisi ini merepotkan pemerintah pusat yang seharusnya menjawab wilayah administrasi yang baru ini dengan berbagai perangkat pemerintahan, seperti rumah sakit, penjara, termasuk pendirian wilayah administratif yang baru untuk TNI dan Polri. Dalam prosesnya yang

kemudian terlahir adalah pembangunan semu yang hanya menguntungkan segelintir elite di daerah, bukannya masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut.

Terus berlangsungnya kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) di berbagai daerah, yang berlanjut dengan sengketa atas hasil-hasil pilkada itu sendiri, terus melahirkan berbagai kerawanan di bidang keamanan tidak saja di daerah pemilihan itu, tetapi juga di daerah sekitarnya. Bahkan, sengketa atas hasil pemilihan kepala daerah itu terus berlanjut di pengadilan dengan biaya sosial yang lebih besar. Dalam hal ini, mudah sekali terjadi letupan emosional menjelang pencoblosan, saat pencoblosan, ketika penghitungan suara, pengumuman pemenang pemilu, termasuk saat pengangkatan pemimpin yang terpilih. Setelah duduk dalam pemerintahan, sekalipun sudah dikukuhkan oleh keputusan presiden, pimpinan yang terpilih itu biasanya didera oleh berbagai krisis baru. Mereka harus membayar kewajiban hutang yang sangat tinggi pada saat pemilu. Karena konsentrasi pikirannya terkurang untuk mengatasi masalah itu, pimpinan daerah yang seharusnya mulai menyusun program pembangunan justru merasa kesulitan untuk membina sebuah pemerintahan daerah yang berbasis pada *good governance* (tata pemerintahan yang baik).

Benar, legitimasi dari rakyat dan pemerintah pusat memang dimilikinya. Walaupun pejabat daerah telah memiliki legitimasi yang cukup kuat, namun, pemerintah di tingkat pusat dan daerah belum sepenuhnya mampu menjalankan program yang dijanjikannya saat kampanye pilkada, seperti menyediakan sarana dan prasarana umum, melindungi hak-hak kelompok minoritas, meniadakan ekonomi biaya tinggi, serta menyiapkan birokrasi yang berdaya saing. Kendala klasik atas semua ini adalah keterbatasan keuangan pemerintah yang dialirkan ke daerah, dan sangat sulitnya birokrasi ketika harus mengelola aset daerah secara terencana dan transparan. Jujur saja, saat ini, masih banyak aparat birokrat terkait yang ada di daerah memiliki *conceptual skill* berkaitan dengan program pembangunan yang harus dilaksanakan.

Krisis multidimensi yang terjadi saat ini telah mempersulit terbentuknya sebuah masyarakat madani (*civil society*). Ini terjadi karena masyarakat luas masih menginduk kepada kelompok agama, partai politik, kelompok media, asosiasi bisnis, dan kelompok-kelompok budaya primordial lainnya. Pada saat yang sama, mereka sulit sekali melepaskan ketergantungan itu. Kondisi inilah yang semakin mempersulit terbentuknya sebuah kelas menengah yang mandiri, progresif, profesional, dan demokratis untuk mempercepat pemulihan (*recovery*) ekonomi dan pencapaian stabilitas politik yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan pemerataannya.

Terus berlarut-larutnya krisis horizontal yang terjadi di wilayah tertentu, sesungguhnya, berpeluang besar melahirkan krisis horizontal di luar wilayah tersebut, bahkan akan berimbas ke daerah lainnya. Kondisi ini, biasanya, melibatkan berbagai kekuatan politik di tingkat nasional dan daerah untuk segera menyikapi krisis yang sedang terjadi itu. Jika sikap ini yang diambil, kekuatan partai politik yang ada akan mengirimkan berbagai sumber daya manusia dan akses ekonomi, termasuk dukungan berupa sikap politiknya. Apakah tindakan reaksi itu akan menguntungkan masyarakat yang berkonflik? Alih-alih yang memperbaiki suasana politik, intervensi partai politik justru memperburuk krisis yang terjadi.

3. Konteks Sosial Budaya

Setelah dimensi ekonomi dan politik, kita juga dapat mengenali dengan baik tantangan-tantangan di bidang sosial budaya pun sedemikian berat. Jika tantangan ini tidak segera diselesaikan, masalah lanjutan yang muncul darinya akan mempersulit pelaksanaan program pembangunan.

Negara kita memiliki keterbatasan yang sangat jelas atas pemahaman keanekaragaman hayati telah memperlemah kontrol dan pemberdayaan atas industri yang berbasis bioteknologi dan cadangan pangan. Sebaliknya, pihak asinglah yang justru menguasai teknologi informasi dan memiliki jaringan internasional yang sangat kuat. Pemahaman itu telah mendorong mereka untuk mematenkan (*copyright*) atas Keanekaragaman Hayati asal Indonesia, sekalipun mereka harus melanggar prinsip-prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Akibatnya, terjadilah penurunan kredibilitas pemerintah di hadapan rakyatnya sendiri karena dianggap tidak mampu melindungi hak-hak rakyat yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat pendidikan yang kurang berdaya saing, seiring dengan tingginya angka putus sekolah dan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja dalam berbagai sektor, telah mengurangi nilai tawar tenaga kerja Indonesia di dalam negeri. Di sisi lain, dunia usaha sudah terbiasa mengandalkan tenaga kerja asing yang akrab dengan prinsip-prinsip globalisasi seperti teknologi komputasi dan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi dalam bisnis.

Terbatasnya pemahaman atas prinsip-prinsip masyarakat majemuk telah melahirkan krisis dalam hubungan antarmasyarakat. Krisis interaksi ini tidak saja terjadi dalam sebuah agama, tetapi, juga antaragama. Inilah yang kemudian menimbulkan konflik sosial dan perpecahan dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal.

Semakin meluasnya berbagai budaya instan dalam masyarakat—misalnya, ditandai oleh sikap lebih menghargai hasil daripada proses atau tahapan—telah menumbuhkan perilaku budaya melakukan tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada saat yang sama, penyalahgunaan narkoba semakin meluas, bahkan melintas batas usia. Kegiatan yang menjurus pornografi, pornoaksi, dan perjudian pun semakin menjauhkan masyarakat Indonesia dari prinsip-prinsip masyarakat yang beragama dan berbudaya.

Sebuah data menyebutkan, saat ini, di Indonesia, konsumen pemakai narkoba sudah lebih dari 3,2 juta orang. Data 2004 Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan, sekitar 3,2 juta (1,5% dari total penduduk) orang penduduk Indonesia sudah menjadi pengguna narkoba yang loyal (setia). Dari 1,5% pengguna itu, 69% adalah pengguna teratur dan setia, sedangkan 31% lainnya adalah pencandu yang sudah “taat” kepada barang setan itu.

Data lain menunjukkan, ternyata, para pengguna obat-obat setan itu tidak hanya kaum pria. Ini ditunjukkan oleh data bahwa 79% para pengguna narkoba adalah pria, sedangkan 21% adalah wanita. Secara sosial-ekonomi, besarnya kerugian karena peredaran obat-obat berbahaya itu sudah mencapai 23,6 trilyun per tahun. Saat ini, narkoba sudah menyerang bilik-bilik rumah tangga miskin sekalipun. Kita sudah mafhum bahwa efek yang ditimbulkan oleh obat-obatan berbahaya ini adalah berbagai penyakit yang sulit disembuhkan, kecuali kematian. Ia bukan hanya merusak kehidupan pribadi, rusaknya masa depan, melainkan menjadi pembunuh yang paling efektif. AIDS hanyalah salah satu penyakit yang muncul dari narkoba ini.

Lalu, apa yang menjadi biang penyebab semakin tingginya pemakaian narkoba di negeri ini? Banyak para pengamat sosial, termasuk pengacara, yang mengemukakan berbagai teori tentang penyebab semakin merebaknya peredaran narkoba di Indonesia. Bila diringkas, ada tiga penyebab utama semakin merebaknya peredaran narkoba di negeri ini.

1. Lemahnya sistem pengelolaan dan pengawasan narkotika secara legal-formal sehingga UU No. 22/1997 perlu direvisi.
2. BNN harus lebih proaktif dalam upaya serius pemberantasan narkoba di seluruh sisi, baik para penegak atau aparat hukum maupun masyarakat sipil.
3. Pengawasan narkoba di Indonesia harus juga mengadopsi konvensi internasional karena, bagaimanapun, wilayah Indonesia menjadi bagian wilayah yang peredaran narkobanya sangat besar.

Dulu, Indonesia hanyalah wilayah transit dalam peredaran narkoba dan sejenisnya. Tetapi, melihat pangsa-pasar yang sangat potensial, ditambah lagi semakin rapuhnya generasi mudah, para produsen memindahkan wilayah operasinya. Dengan berani dan bangga, bahkan, mereka (para perusak generasi itu) memindahkan pabriknya ke beberapa kota di Indonesia. Masih segar dalam ingatan kita ketika di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, ada sebuah daerah yang dijadikan markas dalam pengembangan ekstasi terbesar di Asia Tenggara. Apa yang pernah terjadi di Serang Banten itu, hanyalah bagian puncak dari gunung kemaksiatan berupa narkoba yang terjadi di negeri ini.

Prinsip-prinsip kebebasan pers sudah digulirkan ke publik. Sayangnya, pemberian kebebasan ini tidak diimbangi oleh perundang-undangan yang berlaku, serta terbatasnya fungsi kontrol pemerintah dan masyarakat. Itulah sebabnya, tidak lama setelah legitimasi kebebasan pers digulirkan, sambutan untuk mendirikan penerbitan media menjamur seperti jamur di musim hujan. Sayangnya, tidak sedikit dari media massa cetak dan elektronik yang baru itu justru menyampaikan pemberitaan dan informasi yang rendah. Bahkan, ada di antara media massa yang justru melecehkan budaya nasional, dan memanipulasi selera rendah masyarakat. Kondisi yang diciptakan oleh insan pers pragmatik ini melahirkan sebuah kebingungan dan kegelisahan psikologis yang sangat berat di kalangan masyarakat. Masyarakat merasa sangat kesulitan untuk membedakan antara fakta dan opini yang dikemukakan oleh media massa itu. Bahkan, opini masyarakat seringkali dibenturkan secara sepihak oleh berbagai aktor politik oportunis dan oportunis untuk meraih kepentingan sesaat yang ia harapkan. Tindakan oknum politisi oportunis inilah yang memperlambat ketahanan budaya di tingkat nasional dan daerah.

Di sisi lain, secara internal, ada keterbatasan koordinasi di tingkat birokrasi. Bahkan, lemahnya koordinasi ini sedemikian parah sehingga semakin mempersulit pemerintah untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dampak lanjutan yang kemudian muncul adalah sulitnya pemerintah untuk mempublikasikan berbagai kebijakan publik. Contoh terbaru adalah penyelenggaraan berbagai kebijakan massal seperti penyaluran bantuan langsung tunai, penyaluran beras, penyelenggaraan program wajib sekolah, termasuk menyelenggarakan program kesehatan secara murah dan mampu menjangkau rakyat miskin. Fakta di lapangan, kebijakan ini justru dinikmati oleh segelintir yang tidak berhak untuk mendapatkan bantuan dari kebijakan itu.

4. Konteks Pertahanan dan Keamanan

Selama beberapa tahun, posisi Polri diperhadapkan dengan TNI selalu menjadi bahan perdebatan yang panjang. Perdebatan panjang tentang status hukum Polri di tubuh militer itu, kini, sudah berakhir seiring dengan lahirnya UU No. 2/2002. Undang-undang ini secara jelas dan gamblang menempatkan posisi yang berbeda jauh dengan masa sebelum lahirnya undang-undang. Kendatipun demikian, pemisahan Polri dari TNI masih menimbulkan berbagai konsekuensi.

Benar, di level pimpinan, kesepahaman atas pembagian lahan pertahanan dan keamanan antara Polri dan TNI telah tercipta sedemikian baik. Namun, terbatasnya pemahaman anggota TNI dan Polri pada satuan-satuan terkecil atas tugas dan wewenangnya telah melahirkan berbagai salah tafsir yang seringkali meresahkan masyarakat. Ketidakhahaman tugas dan wewenang oleh sebagian anggota Polri dan TNI ini telah memperkeruh hubungan kedinasan pada satuan yang lebih besar.

Belum tuntas penyelesaian konflik yang sering terjadi antara Polri dan TNI, muncul pula masalah baru, yakni kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkna, pada masa lalu, kasus HAM ini telah melahirkan berbagai kontroversi di tingkat elite pemerintahan, yakni terjadi polarisasi antara mereka yang benar-benar reformis dan mereka yang masih mengantungkan kredibilitasnya pada sebaaian elite masa lalu. Perbedaan pandangan ini biasanya diperparah oleh berlangsungnya persidangan yang menyita waktu dan perhatian publik di dalam dan luar negeri.

Masalah internal yang juga menjadi beban psikologis pertahanan dan keamanan negara kita adalah politisasi atas isu terorisme dan semakin meningkatnya kualitas-kuantitas aksi terorisme di seluruh dunia. Peningkatan isu dan aksi terorisme ini memungkinkan terjadinya aksi teror di berbagai wilayah di Indonesia. Sesungguhnya, stigma teroris kepada agama tertentu merupakan tindakan salah kaprah yang justru memperparah keadaan. Benar, tindakan teror ini boleh jadi dikendalikan oleh berbagai kalangan yang tidak bertanggung jawab di dalam dan luar negeri.

Pada saat yang sama, negara kita mendapat stigma yang buruk dari dunia internasional yang dimotori oleh Amerika Serikat seiring dengan belum tertangkapnya tokoh teroris Noordin M. Top, termasuk berbagai jaringan di bawahnya. “Kelambangan” atas penanganan aksi terorisme ini telah melahirkan berbagai tudingan negatif dari kalangan luar negeri bahwa negara kita dianggap sebagai lahan subur terorisme dunia. Tentu saja, dalam jangka panjang, stigma ini berdampak pada penurunan citra Indonesia di luar negeri.

Saat ini, berbagai tindak kejahatan pun semakin meluas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tindak kejahatan itu dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis: *the new dimention of crime*, tipe kejahatan lama dengan menggunakan teknologi baru; *the new type of crime*, tipe kejahatan yang baru dikenal; *organized crime*, kejahatan yang terorganisir, termasuk *white collar crime*, kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh kelompok intelektual yang berperangkat teknologi canggih. Pemerintah masih merasa kesulitan untuk menanggulangi berbagai aksi *transnational crime* atau kejahatan lintas negara yang melibatkan berbagai aktor dan sumber daya sekaligus dari berbagai negara itu. *Transnational crime* yang masih sulit ditanggulangi oleh pemerintah itu terdiri dari i) *terrorism*; ii) *illicit drug trafficking*; iii) *trafficking in person*; iv) *money laundring*; v) *arm smuggling*; vi) *sea piracy*; vii) *cyber crime*; dan viii) *international economic crime*.

Masalah di bidang pertahanan dan keamanan lainnya adalah masih rentannya stabilitas keamanan batas wilayah negara, kurangnya perjanjian-perjanjian bilateral untuk

mengatasi TOC (*Trans Organized Crime*), lambannya kemampuan memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi dan informasi, serta tingginya mobilitas penduduk sehingga memudahkan terjadinya TOC. Terbatasnya koordinasi TNI dan Polri di wilayah perbatasan akibat kelangkaan sumber daya manusia, keuangan dan teknologi, turut meningkatkan berbagai tindak kejahatan yang selanjutnya menyebar ke wilayah yang lebih luas di dalam negeri.

5. Konteks Ideologi

Walaupun Pancasila tetap merupakan ideologi negara, namun, kita telah terlanjur menghadapi banyak kecenderungan yang terus berkembang. Saat ini, sedang berkembang ideologi asing yang mengutamakan nilai-nilai materialisme dan kebebasan. Ideologi materialisme-liberalisme ini semakin meluas secara tersamar dalam masyarakat melalui berbagai aktivitas ekonomi dan sosial budaya. Cepat atau lambat, ideologi yang sesaat ini akan berpotensi mendangkalkan pemahaman elite pemerintah dan masyarakat atas Pancasila sebagai ideologi negara sebagaimana amanat UUD 1945.

Pada saat yang sama, kesadaran di kalangan pejabat pemerintah dan sebagian besar masyarakat tentang perlunya sebuah ideologi nasional semakin berkurang. Penurunan ini, sekali lagi cepat atau lambat, semakin memperlemah kedudukan dan peran Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Salah satu indikasi yang mulai tampak jelas adalah langkanya proses internalisasi Pancasila sebagai ideologi seperti yang terjadi pada periode sebelumnya. Internalisasi Pancasila sebagai ideologi yang dimaksud adalah revitalisasi nilai-nilainya yang pernah diselewengkan oleh penguasa era Orde Baru.

Dalam sambutannya di hadapan peserta Simposium Nasional Peringatan Hari Lahir Pancasila, Jakarta, 1 Juni 2006, Presiden RI, Dr. Susiolo Bambang Yudhoyono, mengatakan:

Kita menginginkan bangsa Indonesia, sampai kapan pun, tetap utuh dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang tumbuh, berkembang, dan bertahan utuh atas dasar jiwa, semangat, dan nilai-nilai Pancasila. Kita berharap, setelah amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pancasila sebagai dasar negara tidak lagi diperdebatkan. Semua kekuatan politik yang ada di MPR, ketika berlangsung proses amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945, telah bersepakat bulat untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.

Persoalan yang perlu dikaji bersama, sesungguhnya, bukan lagi Pancasila sebagai dasar negara, tetapi bagaimana melakukan reorientasi dan revitalisasi secara nyata pengamalan atau pelaksanaan Pancasila pada era reformasi sekarang ini. Kita tidak menginginkan semangat reformasi mengecilkan peran dasar negara, apalagi sampai melupakannya. Kita juga tidak boleh mengulang kebijakan masa lalu yang menjadikan Pancasila sebagai legitimasi untuk melanggengkan kekuasaan. Cara itu akan menjadikan Pancasila menjadi kehilangan makna dan nilai filosofisnya. Pancasila adalah dasar negara yang jelas dan sederhana, jika kita mempraktikkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

Mengapa kita harus melakukan reorientasi dan revitalisasi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila? Karena Pancasila, sampai sekarang dan sampai kapan pun, tetap diterima dan dipertahankan sebagai dasar negara. Pancasila adalah landasan bersama atau "*common flatform*" bangsa kita yang majemuk ini. Sejak awal kelahirannya, Pancasila diterima sebagai *philosofische grondslag*, dasar, filsafat, pikiran, jiwa, dan hasrat yang sedalam-dalamnya untuk menjadi dasar negara. Namun, ketika arus reformasi terus bergulir Pancasila terkesan tidak lagi dijadikan rujukan utama dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa. Wacana tentang Pancasila seolah-olah mengalami trauma setelah berakhirnya era Orde Baru. Padahal nilai-nilai Pancasila tetap

relevan dengan kehidupan bangsa, sekarang dan masa depan. Karena itu, ada baiknya jika kita sekarang menelaah kembali nilai-nilai itu untuk dijadikan sebagai landasan dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa.

Landasan spiritual bersumber kepada Tuhan Yang Maha Esa. Landasan moral bersumber pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia, serta menjamin hak-hak asasi manusia. Sila Persatuan Indonesia memberikan tempat pada kemajemukan, sama sekali tidak menghilangkan perbedaan alamiah dan keragaman budaya dan etnik. Dalam semangat persatuan dan kesatuan itu, kita berupaya mencegah segala bentuk separatisme, baik atas dasar kedaerahan, agama, suku, maupun pendirian politik. Semangat untuk tetap bersatu juga berakar pada asas kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Jiwa persatuan dan kesatuan itu juga mencita-citakan perwujudan masyarakat yang adil dan makmur.

Evaluasi untuk Konteks Indonesia

Berdasarkan kajian atas semua perspektif tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuatan sebuah kebijakan publik, saat ini, sangatlah sulit. Masalah ini pun dibenarkan oleh Lee Kuan Yew dalam kunjungannya di Indonesia pada Juli 2007. Mantan Perdana Menteri Singapura ini memberikan kesimpulan tidak langsungnya kepada pemerintah Indonesia. Kesimpulan yang disampaikan itu, sebenarnya, telah disadari oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Apa saja kesimpulan yang disampaikan olehnya?

1. Kebijakan yang dibuat pemerintah sangat mudah dipatahkan oleh parlemen.
2. Kepemimpinan nasional belum bekerja konsisten berdasarkan janji-janji yang pernah dikemukakannya kepada masyarakat saat berkampanye dalam pemilihan presiden.
3. Pemimpin belum mampu berkomunikasi secara baik dengan pengikutnya sehingga ide-ide dan pemikiran pemerintah sulit dicerna oleh masyarakat luas⁸.

Tiga kesimpulan yang bernas ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah untuk segera melakukan perubahan. Kita harus mengakui bahwa sebuah kebijakan luar negeri yang komprehensif, berjangkau masa depan (futuris), dan benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab hanya mungkin dilakukan oleh sebuah negara yang lingkungan politik dalam negerinya stabil. Kebijakan komprehensif itu pun hanya bisa ditetapkan oleh kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis. Sepanjang kita belum berhasil menyelesaikan masalah-masalah tersebut, negara kita tetap akan terbelakang, sementara Singapura terus maju ke depan sebagai negara terdepan dalam segala aspek kemajuannya. Mampukah kita mendampingi Singapura dalam kemajuan sebagai bangsa modern yang bermartabat?

Bagian Kedua DAMPAK SEBUAH KETIDAK-BERDAYAAN DALAM PRAKTIK POLITIK LUAR NEGERI

⁸ Kompas, 2007. 'Lee Kuan Yew: Multipartai Itu Menyulitkan'. 25 Juli. Hal 1 dan 15.

STUDI KASUS-1: POTRET HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-SINGAPURA

Hubungan Indonesia-Singapura merupakan sebuah gambaran yang “agak jomplang”. Disebut “agak jomplang” karena negara yang satu memiliki luas wilayah dan beragam potensi lainnya, tetapi seperti tidak berdaya; sementara negara yang satu lagi wilayahnya hanya sebesar sebuah kota. Sedemikian kecil wilayah negara ini sehingga ia layak disebut sebagai *city-state*, bukan *nation-state*.

Semesrinya, kepemilikan wilayah yang luas dan sumber daya alam yang sangat beragam itu, secara otomatis, akan menguntungkan negara kita. Tetapi, apa yang terjadi justru sebaliknya. Singapura yang menguasai teknologi komunikasi, teknologi informasi, dan teknologi transportasi yang canggih itu justru berada dalam posisi yang pengendali, bukan yang dikendalikan.

Konteks Ekonomi

Dari sisi level ekonomi, banyak kritik yang menilai negara kita sebagai “backyard” (kebun halaman belakang) dari sebuah taman yang sangat indah bernama Singapura. Salah satu bukti atas penilaian itu adalah posisi pulau Batam dan Bintan yang dimasukkan oleh Singapura ke dalam skema *Free Trade Agreement* (FTA) antara Singapura dan Amerika Serikat. Padahal, secara legal formal, pulau Batam dan Bintan menjadi bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang, secara eksplisit, pulau Batam-Bintan tidak dinyatakan dalam klausul FTA antara Singapura dan AS. Namun, dalam penerapan *Rule of Origin* (ROO), kedua negara itu bersepakat untuk menerapkan *percentage criterion*. Salah satu klausulnya menyebutkan bahwa 40% komponen lokal Singapura dinyatakan sebagai *Singapore Origin*, walaupun produknya ternyata diperoleh dari pulau Batam dan Bintan.

Produk yang dapat dikaitkan ke dalam mekanisme penerapan *percentage criterion* tersebut meliputi 200 jenis produk hasil teknologi industri dan peralatan kesehatan. Secara ekonomi, masuknya wilayah pulau Batam dan Bintan ke dalam skema klausul FTA antara Singapura dan AS merupakan peluang yang sangat besar bagi meningkatkan daya tarik kedua wilayah Indonesia ini sebagai daerah tujuan investasi. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus segera melakukan langkah-langkah praktis untuk menjadikan pulau Batam dan Bintan sebagai basis pengembangan manufaktur yang dijual di Singapura. Jika konsep pengembangan kedua pulau yang menjadi basis bagi manufaktur itu berhasil, pada akhirnya, akan memberikan jaminan untuk dapat memasuki pasaran di Amerika Serikat. Masalahnya, mampukah kita memanfaatkan peluang yang sangat besar itu? Itulah masalahnya, walaupun peluang ini sudah terbuka, kita masih belum memiliki strategi besar untuk mengoptimalkannya.

Masih pada level ekonomi, kita telah membuka Kantor Promosi Jambi (Jambi Promotion Office, JPO) di Singapura. Kantor JPO yang resmi telah diresmikan penggunaannya pada 4 Desember 2003. Melalui JPO ini, hubungan bisnis antara pengusaha Jambi dan Singapura diharapkan akan semakin dekat. Salah satu yang diharapkan akan hidup dan berkembang adalah hubungan penerbangan. Jika selama ini hubungan bisnis dengan Singapura harus melalui melalui Jakarta, sekarang, hubungan bisnis itu akan

langsung dilakukan antara Jambi dan Singapura. Jadi, rute penerbangan antara Jambi dan Singapura akan semakin hidup, bahkan berkembang pesat.

Rute penerbangan dan hubungan bisnis yang semakin pendek akan sangat menguntungkan bagi para pengusaha. Hasilnya, para pengusaha asal Jambi yang biasa mengekspor hasil produksi perkebunan dan perikanan, seperti karet, kopra, kopi, dan hasil laut ke Singapura akan semakin mudah. Sebaliknya, para pengusaha asal Singapura akan mengekspor barang manufaktur, pakaian jadi, dan barang kebutuhan rumah tangga dengan cepat. Seiring dengan semakin meningkatnya hubungan ekonomi tersebut akan mendatangkan nilai tambah. Masalahnya, nilai tambah seperti apakah yang dapat kita peroleh saat ini dari hubungan bisnis itu?

Masalah lain yang menuntut pemecahan segera adalah proyek reklamasi di bagian selatan Singapura yang menjorok ke arah wilayah NKRI. Proyek reklamasi ini akan berlangsung hingga 2010. Padahal, pasokan pasir laut untuk keperluan reklamasi tersebut diperoleh dari Indonesia, tepatnya kepulauan Riau. Akibat permintaan yang tinggi terhadap pasir laut, dampak buruk yang kemudian timbul dan harus diterima oleh Indonesia adalah penyelundupan dan kerusakan lingkungan yang sangat parah.

Dari sisi Indonesia, dorongan daerah untuk memperoleh pendapatan dari penjualan pasir semakin meningkat. Untuk pelaksanaan proyek reklamasi tersebut, Singapura diperkirakan membutuhkan pasir sebanyak 1,615 milyar kubik. Dalam pelaksanaan ekspor pasir laut tersebut, saat ini, kita mulai mempertimbangkan aspek ekonomi, perdagangan, geostrategis, politik dan keamanan dan lingkungan hidup. Kebijakan kita yang mengkaji ulang kebijakan ekspor pasir laut ke Singapura ini, untuk sementara waktu, sangat merugikan Perusahaan Pemerintah (*Government Link Company, GLC*). Singapura, selama ini, melakukan reklamasi pantai dengan menggunakan pasir laut dari Kepulauan Riau. Padahal, ke depan, pengerukan pasir dari Kepulauan Riau dikhawatirkan akan semakin mengaburkan perbatasan perairan, sekaligus menjadi potensi konflik perbatasan di Selat Philips dan Selat Malaka.

Secara ekonomi, kritik Singapura atas masalah perdagangan dan investasi di Indonesia menjadi referensi bagi penting para pengusaha dan investor asing lainnya, baik para investor yang berkedudukan di dalam maupun di luar Singapura. Perkembangan situasi politik, sosial dan ekonomi yang banyak dikeluhkan oleh investor Singapura di Kawasan Batamindo Industrial Park (BIP) meliputi beberapa hal berikut:

- a) Ketidakstabilan sosial dan keamanan di kepulauan Riau;
- b) Masalah Perburuhan;
- c) Menurunnya daya saing investasi sehubungan dengan meningkatnya Upah Minimum Regional (UMR); dan
- d) Ketidakpastian ekonomi dan politik termasuk penerapan Otonomi Daerah.

Permasalahan perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Singapura menjadi penyebab munculnya kesulitan yang dihadapi oleh para nelayan Indonesia. Jika kendala yang mereka hadapi ini tidak segera diselesaikan, para nelayan dipastikan akan mengalami penurunan produktivitas yang sangat drastis.

Seperti diketahui, pengerukan pasir yang terjadi di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Singapura telah berlangsung sejak 1970. Pengerukan pasir yang tanpa henti dan, kadang-kadang, mengabaikan keseimbangan lingkungan ini, telah mengakibatkan

dikeruknya jutaan ton pasir setiap bulan. Akibat yang sulit dihindari adalah kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah.

Di sisi lain, matapencaharian nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut terganggu oleh penambangan pasir laut itu. Jelas sekali, kerusakan ekosistem yang ditimbulkan oleh penambangan pasir laut telah menghilangkan sejumlah matapencaharian para nelayan. Penambangan pasir laut juga mengancam keberadaan sejumlah pulau kecil yang ada di sekitarnya. Ini terjadi penambangan itu dapat mengganggu keseimbangan tanah daratan, bahkan dapat menenggelamkan beberapa pulau kecil, misalnya Pulau Nipah. Jika beberapa pulau kecil itu benar-benar tenggelam, kerugian yang sangat besar harus siap ditanggung Indonesia. Mengapa? Karena perubahan kondisi geografis pantai akan sangat berdampak pada penentuan batas maritim dengan Singapura di kemudian hari⁹.

Sudah sejak lama kedua negara mengadakan kerja sama perdagangan bilateral. Kini, kedua negara itu sedang menghadapi kebimbangan yang sudah diambang batas ketika mereka menyikapi perbedaan data statistik perdagangan bilateral yang sangat jelas. Penyebutan angka dan data yang dikeluarkan oleh International Interprose (IE) Singapura dengan angka-data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik memunculkan perbedaan yang sangat besar¹⁰. Di dalam data itu terlihat adanya selisih nilai yang sangat signifikan, sebagai berikut.

	Versi Kedubes Sin (Jan-Des 2002) (Sumber: IE Sin)	Versi Indonesia (Jan-Des 2002) (sumber: BPS Jkt)	Selisih Nilai
	1	2	3
Total	US\$ 13.843	US\$ 9.449	US\$ 4.394
Ekspor Sin	US\$ 6.001	US\$ 4.100	US\$ 1.901
Impor Sin	US\$ 7.842	US\$ 5.349	US\$ 2.493

Mengapa perbedaan angka dan data yang sangat mencolok itu terjadi? Ada banyak kemungkinan yang mempengaruhi. *Pertama*, salah satu pihak tidak mampu menelusuri tentang bentuk transaksi yang sebenarnya terjadi, berikut data-data yang terkait dengan transaksi. *Kedua*, angka penyelundupan sangat tinggi sehingga banyak data dan angka perdagangan yang tercatat di dalam lembaran negara. *Ketiga*, data-data yang disebutkan masih belum akurat, bahkan tidak sedikit yang boleh jadi mengalami pemalsuan angka.

Konteks Strategis

1. Perkembangan Terkini

⁹ <http://www.suarapembaruan.com/News/2004/08/13/Editor/edi01.htm> diakses pada tanggal 02 Februari 2006

¹⁰ *The Jakarta Post*, 2003. 'RI – Singapore Trade'. 12 Juni. Hal. 1.

Indonesia dan Singapura telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (*Defense Cooperation Agreement*, DCA) pada Mei 2007 lalu. Perjanjian ini ditandatangani satu paket dengan Extradition Treaty (ET) yang telah digagas oleh Indonesia untuk mengejar para tersangka tindak pidana Korupsi yang lari dari Indonesia dan pergi ke Singapura. Kedua perjanjian ini sendiri telah dibahas oleh kedua negara sejak 2005. Bagi Indonesia, kedua perjanjian itu dianggap sebagai bentuk *strategic engagement* yang sangat penting. Mengapa? Karena selain menandatangani tentang kerja sama pertahanan, Indonesia dan Singapura juga menandatangani kesepakatan ekstradisi di antara kedua negara.

Namun, sejak ditandatangani, hingga saat ini, status perjanjian itu menjadi mengambang. Ini terjadi karena munculnya sikap pro dan kontra bagi di Indonesia maupun Singapura. Kondisi pro dan kontra ini membuat kedua pemerintahan menjadi sulit untuk melanjutkan kedua perjanjian tersebut. Indonesia dan Singapura terjepit oleh kondisi dilematis yang sangat berat.

Dari dalam negeri Indonesia, berbagai kalangan mempertanyakan proses penyusunan DCA yang tidak transparan. Sikap mempertanyakan itu muncul karena proses sosialisasi awal terhadap draft DCA yang disusun nyaris tidak diketahui oleh publik hingga akhirnya ditandatangani pada Mei 2007. Bagi publik, ketidak-transparanan dalam sosialisasi ini memberi kesan bahwa pemerintah Indonesia dan Singapura berusaha menutup-nutupi penyusunan kedua perjanjian tersebut. Akhirnya, ketika perjanjian itu ditandatangani dan disosialisasikan, muncullah respon nonprogresif dari berbagai kalangan.

Kritik juga dilancarkan pada pola kebijakan Indonesia yang berorientasikan pada “uang untuk ruang”. Kebijakan “money for space” ini seringkali disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono. Kebijakan ini pula yang kemudian memelopori digabungkannya konsep perjanjian DCA dengan ET. Seorang peneliti dari *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), Edy Prasetyono, mengatakan bahwa DCA seharusnya bisa disepakati secara tersendiri, tidak perlu digabung¹¹.

Banyak pula kritik yang diarahkan pada isi dari perjanjian tersebut, tidak hanya pada proses sosialisasinya. Salah satunya tentang beberapa daerah yang disepakati untuk dijadikan tempat latihan militer antara Singapura dan Indonesia. Tentang hal ini, beberapa pihak berpendapat bahwa penentuan wilayah Indonesia sebagai tempat latihan militer gabungan merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan RI. Menanggapi hal ini, Menhan Juwono Sudarsono mengatakan bahwa pada era globalisasi, saat ini, tidak ada lagi kedaulatan yang mutlak.¹² Mengapa? Karena, menurutnya, banyak negara yang kemudian membuka kesempatan kerja sama yang lebih luas dan nonkonvensional.

Lebih jauh lagi, protes dan ketidak-setujuan tentang penggunaan wilayah sebagai tempat latihan militer muncul dari propinsi yang wilayahnya termasuk daerah yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Heriandi Sulthon, menyatakan bahwa ia telah menemui Komisi I DPR RI pada 17 Juli 2007, bersama sejumlah perwakilan dari keenam fraksi yang ada di DPRD-nya. Ia dan sejumlah perwakilan fraksi itu menemui Komisi I DPR RI untuk menyampaikan keberatan, sekaligus penolakan terhadap rencana kerja sama pertahanan (DCA) antara Indonesia dan

¹¹ ‘Tidak Lazim, Wilayah Dipakai Latihan Militer Negara Lain’. Dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0707/05/utama/3654939.htm>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2007

¹² ‘Menhan: Tidak Ada Kedaulatan Mutlak’. Dalam <http://web.bisnis.com/umum/politik-internasional/1id8250.html>. Diakses pada tanggal 22 JULI 2007.

Singapura. Bagi mereka, langkah itu dilakukan karena salah satu pasal DCA itu menyebutkan bahwa Kawasan Baturaja akan diatur dan ditetapkan sebagai salah satu wilayah area latihan militer yang akan digunakan oleh Angkatan Darat Singapura ketika mengadakan latihan. Memang, di wilayah itu terdapat Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Darat Baturaja.¹³ Kritik pun diarahkan pada aspek jangka waktu perjanjian yang berjangka waktu 25 tahun. Dengan jangka waktu yang cukup lama itu dikhawatirkan akan lebih merugikan Indonesia. Mengapa? Karena dalam jangka waktu lama tersebut tidak terdapat pengawasan atas aktivitas militer Singapura oleh pihak Indonesia di daerah yang diatur dalam perjanjian DCA.

2. Dampak atas Hubungan Indonesia-Singapura

Berdasarkan kajian strategis tentang hubungan bilateral, baik hubungan perdagangan maupun militer itu, ada dampak lanjutan yang harus diwaspadai. Menurut pandangan kami, keadaan ini akan berpengaruh atas hubungan bilateral yang dampaknya berdaya jangkauan panjang. Ini terjadi klausul yang tercantum di dalam DCA ini seharusnya dievaluasi kembali. Jika tidak, beberapa kecenderungan dimungkinkan akan muncul, dan merugikan negara kita.

- a. Terjadi ketegangan intelektual antara elite keamanan dalam kabinet yang melibatkan mereka yang pro dan kontra atas klausul perjanjian ini. Jika ketegangan ini dibiarkan berlarut, ia akan berdampak pada elite yang terbentuk pasca-2009, yakni kemungkinan adanya kecenderungan elit politik untuk memisahkan diri dari polemik yang belum terselesaikan ini.
- b. Kecenderungan sulitnya membuat kesepakatan baru di luar aspek pertahanan dan keamanan di berbagai tataran nonkeamanan seperti ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. Dengan begitu, terbuka peluang bagi pemerintah Singapura untuk berupaya membandingkan tiadanya kredibilitas pemerintah Indonesia sendiri dalam menangani urusan yang kurang strategis di mata pemerintah Singapura.
- c. Semakin sulit mendiamkan Singapura memperjelas posisinya di lingkungan dunia. Ini terjadi karena Singapura selalu merasa dirinya terancam oleh Indonesia secara militer. Dalam hal ini, Singapura memperoleh kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia menolak meratifikasi sebuah dokumen penting yang menjamin tidak saja kedaulatan Singapura, tetapi juga hak Singapura untuk memperoleh rasa aman sebagai negara kecil.
- d. Munculnya kesulitan menciptakan kesamaan posisi dalam ASEAN sehingga akan semakin mempersulit kohesi ASEAN secara keseluruhan. Sebagai konsekuensinya, kesulitan berkoalisi ini akan memperkuat pemahaman yang keliru selama ini bahwa ASEAN hanyalah organisasi elitis yang belum kunjung mampu menciptakan kesepakatan yang mengikat.
- e. Dalam konteks internasional, jelas sekali bahwa *image* Indonesia akan dianggap berpotensi menjadi negara yang tidak mampu menjalankan kesepakatan yang dicapai dalam sebuah perjanjian kerja sama yang dilakukannya. Nilai *pactu sunt servanda* atas Indonesia akan dianggap kurang, terutama untuk perjanjian-perjanjian kerja sama.

¹³ 'Keberatan Kerjasama DCA Indonesia-Singapura, DPRD OKU temui Komisi I' . Dalam <http://www.kompas.com/ver1/Nasional/0707/16/194512.htm>. Diakses pada tanggal 2 Juli 2007.

- f. Terjadi pemborosan karena Indonesia dan Singapura harus melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas DCA yang disepakati. Pembahasan ini akan menjemukan para perunding terdahulu karena mereka tidak lagi membahas sesuatu masalah yang fundamental. Pembahasan itu hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis atau hal-hal yang belum jelas, yang boleh jadi memerlukan waktu lama.
- g. Terlibatnya konfigurasi elite baru di dalam negeri untuk melanjutkan perjanjian yang terlanjur disepakatinya. Keterlibatan ini merupakan keharusan bagi mereka untuk mengkaji ulang semua aspek yang diperlukan, baik dari segi jangka waktu maupun perancangan berbagai skenario alternatif yang tidak atau belum terpikirkan pada periode sebelumnya.
- h. Peluang terjadinya polemik yang menyudutkan citra pemerintah Singapura di dalam negeri Indonesia. Mengapa? Karena pemerintah Indonesia berkeharusan untuk mengonsultasikan semua proses yang sedang berlangsung dengan berbagai kekuatan di dalam negeri, termasuk anggota legislatif. Bagi kalangan DPR dan partai politik, tentu saja, masalah ini merupakan amunisi baru untuk menarik simpati para pendukungnya, sekaligus ajang persiapan menghadapi Pemilu 2009.
- i. Terkurusnya energi pemerintah sendiri karena harus membuat kesepakatan baru dengan kalangan akademik. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh dukungan intelektual yang dapat dibenarkan tidak saja secara teoritis, tetapi juga praktis.

II STUDI KASUS-2: HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA DENGAN KAWASAN AFRIKA

Kerja sama ekonomi antara kawasan Asia dan Afrika telah berkembang pesat terutama pascapelaksanaan Konferensi Asia dan Afrika 1955. Sejak pelaksanaan konferensi tersebut, kekuatan kolonial terpaksa, di sebagian wilayah dipaksa, untuk meninggalkan wilayah jajahannya. Pada saat yang sama, beberapa negara koloni segera menyusul tercapainya kemerdekaan yang berinduk pada perjuangan di dalam negeri. Di sisi lain, negara yang baru merdeka itu mencari daya dukung dari sesama negara sedang berkembang.

Dalam kenyataannya, semangat membangun kerja sama inilah yang melahirkan berbagai bentuk model pembangunan, baik yang dirancang secara mandiri maupun mengandalkan dukungan dari bekas negara penjajah. Mereka juga mencari dukungan dari sesama negara yang sedang membangun. Pencarian model pembangunan inilah yang kemudian melahirkan berbagai model kerja sama yang baru. Namun, sayangnya, manfaat kerja sama ini tidak merata. Ketidakmerataan manfaat kerja sama ini terjadi karena masih terdapat negara-negara yang mampu memanfaatkan momentum ini, dan pada saat yang sama tidak sedikit negara yang masih belum optimal untuk memanfaatkan momentum kerja sama ini.

Perkembangan Terkini

Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan komposisi ekspor dan impor yang dilakukan oleh negara-negara di Afrika dengan negara mitranya dari Asia. Secara sederhana, tabel ini

memperlihatkan juga negara-negara mana saja yang menggunakan produk tersebut sebagai komponen produksi, sekaligus negara-negara yang menyalurkannya kembali ke kawasan dunia lainnya. Secara sederhana pula kita dapat mengamati kedudukan Indonesia dalam berbagai interaksi yang pernah terjadi.

Tabel 1
Ekspor dan Impor 20 Produk Afrika dan Asia

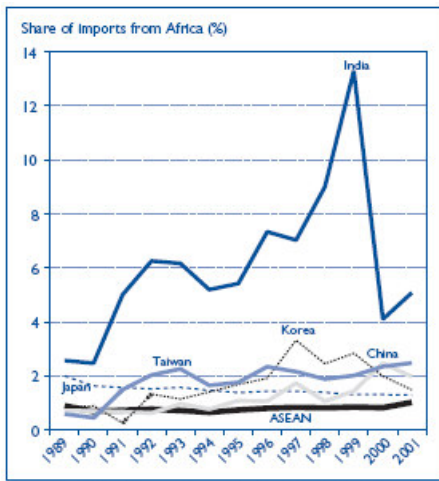
Product	Exporters	Importers
<i>Mineral fuel</i>		
Crude oil (1 st , 32.9%)	Nigeria (34), Angola (23), Rep. of Congo (17), Sudan, Egypt, Cameroon, Gabon, Niger, Equatorial Guinea	China (23), Korea (22), India (22), Taiwan (21), Japan, Indonesia, Singapore
Coal (10 th , 1.5%)	South Africa (99)	Korea (24), Taiwan (24), Japan (24), India (24), Hong Kong, China
Motor spirit and other light oils (14 th , 1.3%)	Egypt (53), Algeria (35), Morocco, South Africa, Sudan, Angola, Libya	Japan (59), Korea (28), Singapore (11), Indonesia
<i>Metal and nonmetal mineral products</i>		
Gold (2 nd , 7.6%)	South Africa (98), Zimbabwe	India (64), Korea (19), Hong Kong, China, Thailand, Japan
Platinum (3 rd , 5.0%)	South Africa (100)	Japan (92), Korea, Hong Kong, China
Aluminum (6 th , 3.3%)	South Africa (99)	Korea (32), Japan (32), Taiwan (13), Malaysia, Thailand, Indonesia, Hong Kong, China
Ferro alloy (7 th , 3.1%)	South Africa (91), Zimbabwe	Japan (51), Taiwan (29), Korea (18)
Copper (11 th , 2.4%)	Zambia (57), South Africa (38), Tanzania	Taiwan (25), Japan (18), Thailand (17), Korea, Malaysia, China, India, Singapore, Indonesia, Pakistan
Iron ore (12 th , 1.7%)	South Africa (99)	China (54), Japan (42), Korea
Diamonds (13 th , 1.6%)	South Africa (60), Rep. of Congo (19), Ghana (18)	China (38), Thailand (37), Hong Kong (20), India
<i>Nonmineral primary commodities</i>		
Cotton (4 th , 3.5%)	Cote d'Ivoire (13), Mali (13), Egypt, Togo, Benin, Zimbabwe, Burkina Faso, Cameroon, Tanzania, South Africa, Sudan, Chad, Central African Republic, Uganda	Thailand (23), Taiwan (22), Indonesia (15), India (15), Malaysia, Korea, Japan, China, Hong Kong, Philippines
Sawlogs (8 th , 2.6%)	Gabon, Cameroon, Equatorial Guinea, Nigeria, Cote d'Ivoire, South Africa, Mozambique, Liberia	China (57), India (20), Hong Kong (10), Japan, Taiwan
Pulpwood (16 th , 1.1%)	South Africa (99)	Japan (97), Korea
Chemical wood pulp (20 th , 0.8%)	South Africa (100)	Indonesia (29), Taiwan (25), Thailand (16), Japan (12), India (10), China
<i>Agricultural and fishery</i>		
Crustaceans & mollusks (9 th , 2.5%)	Morocco (51), Mauritania (20), South Africa (10), Madagascar, Mozambique, Senegal, Ghana, Gambia	Japan (85), Hong Kong, Thailand, China
Nuts (15 th , 1.2%)	Tanzania (36), Guinea-Bissau (16), Cote d'Ivoire (14), Mozambique, Benin, Kenya, Nigeria, Senegal, Ghana	India (97), Japan
Tea (18 th , 0.9%)	Kenya (83), Tanzania, Rwanda, Burundi, Malawi, South Africa	Pakistan (95), Singapore, Japan
Tobacco (20 th , 0.8%)	Zimbabwe (62), Malawi (25), South Africa, Tanzania, Zambia	Japan (47), China (25), Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Thailand
<i>Other</i>		
Organic acids (5 th , 3.3%)	Morocco (53), Tunisia (25), South Africa (12), Senegal	India (94), China, Indonesia
Ships (17 th , 1.0%)	Liberia (72), South Africa (26)	Singapore (62), India (28), Korea, Pakistan

Note: Numbers in parentheses after country names are the percentage shares of total trade values (only 10% or above are indicated).
Source: UN Comtrade.

Secara lebih rinci, grafik berikut ini juga menggambarkan komposisi antara angka ekspor dan impor negara-negara di Afrika dengan mitranya di Asia. Tabel ini pun memberi gambaran tentang posisi Indonesia di antara negara-negara berkembang lainnya.

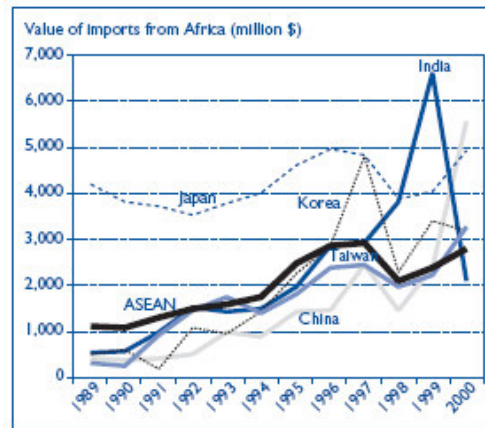
Grafik 1
Ekspor dan Impor Afrika ke/dari Asia
1989-2000

Ekspor



Notes: The ASEAN countries are Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. All figures are based on partners' import data.
Source: UN Comtrade.

Impor



Notes: The ASEAN countries are Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. All figures are based on partners' import data.
Source: UN Comtrade.

Rahasia Dapur Macan Ekonomi Dunia

Secara spesifik, interaksi yang dibangun oleh negara-negara di Asia dengan kawasan Afrika sesungguhnya dapat dipetakan. Pemetaan ini sangat penting bagi sebuah negara untuk menjadi bahan masukan bagi pengambilan kebijakan kerja sama perdagangan bilateral dengan negara lain.

1. India

India memiliki kepentingan terbesar dalam hubungan perdagangannya dengan Afrika. Komoditas-komoditas yang diimpor oleh India, antara lain, minyak mentah, batubara, emas, tembaga, berlian, katun, kayu gelondongan, kayu kimia pulp, kacang-kacangan, asam organik, dan perkapalan.¹⁴

Sejak 1980-an, India menyadari adanya kendala-kendala dalam hal jarak pengiriman, bahasa, keterbatasan informasi, gejolak politik, dan ekonomi makro yang tidak stabil. Namun, sejak 1990-an, India mulai aktif membangun jaringan kerja sama ekonomi dengan negara-negara kawasan Sub-Sahara Afrika. Program ekonomi luar negerinya yang kemudian diusung bertema "Africa Focus". Dengan program unggulan ini, dalam waktu singkat, India berhasil membangun kemitraan dengan tujuh negara inti: Nigeria, Afrika Selatan, Mauritius, Kenya, Ethiopia, Tanzania, dan Ghana. Orientasi ini berhasil mengangkat nilai perdagangan India dengan kawasan Sub-Sahara Afrika dari US \$893 juta pada 1991/1992 menjadi US \$3.390 juta pada 2001/2002.

Pendekatan yang dibangun oleh India ini dikelola secara khusus lewat sebuah divisi yang disebut *Commercial Representatives on Sub-Saharan African Countries*. Beberapa catatan penting yang perlu dicermati sebagai berikut.

¹⁴ Patterns of Africa-Asia Trade and Investment: Potential for Ownership and Partnership.

1. Penandatanganan MoU perjanjian dagang dengan pemerintah Tanzania di Dar-es-Salaam pada Juli 2000.
2. Pertemuan perwakilan dagang India dan Afrika Selatan di Kedutaan Besar India di Pretoria.
3. Konferensi perdagangan dengan kawasan Afrika Bagian Barat di Lagos pada Oktober 2000.
4. Pameran katalog India di Accra, Oktober 2000.
5. Menerima kunjungan Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Ethiopia di India pada Maret 2001.
6. Penyelenggaraan pameran “Enterprise India” di Durban pada Juni 2000.¹⁵

Keberhasilan program ekonomi yang digagas oleh India ini ternyata didukung oleh sinergi yang luar biasa. Program eksklusif ini melibatkan tiga aktor sekaligus: masyarakat keturunan India di Afrika Selatan, pelaku bisnis India di luar negeri, serta para pemodal asal India sendiri. Inilah hubungan segitiga yang sangat menguntungkan. Hubungan integratif di antara tiga komponen tersebut memberi banyak keuntungan sebagai berikut.

1. Mereka mampu beraliansi dengan masyarakat kulit Putih dan Kulit Hitam, antara lain, melibatkan Raja Zulu dan Pimpinan Inkatha (Chief M. Buthelezi) dalam bisnisnya.
2. Mereka mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan yang mengandalkan teknologi tinggi dan upah buruh murah.
3. Bisnis usahawan India mendapat dukungan moral dari enam menteri keturunan India di kabinet Afrika Selatan¹⁶.

2. Jepang

Jepang merupakan salah satu negara Asia yang mempunyai hubungan perdagangan yang cukup besar dengan benua Afrika. Hampir setiap komoditas Ekspor yang ditawarkan oleh Afrika diimpor oleh Jepang. Komoditas tersebut, antara lain, barang-barang mentah atau tambang. Misalnya, minyak mentah, batubara, bahan bakar jadi, emas, platinum, aluminium, biji besi, tembaga, besi batangan, katun, kayu gelondongan, kayu pulp, kimia pulp, udang, kacang, teh dan tembakau. Untuk komoditi minyak mentah, permintaan Jepang tidak terlalu besar karena Jepang mengandalkan kawasan Timur Tengah.

3. Malaysia

Hubungan ekonomi, terutama, dalam perdagangan antara Malaysia dan Afrika masih dalam taraf perkembangan. Dalam hubungan ekonomi, Malaysia menjalin hubungan perdagangan dengan Afrika untuk mengimpor tembaga, katun, dan tembakau.¹⁷ Untuk ekspor ke negara-negara Afrika, Malaysia mengalami peningkatan nilai ekspor sebesar 19.1% menjadi RM 2,2 juta. Produk yang ditawarkan, antara lain, produk *furniture*. Dari

¹⁵ *Report On Indian Head of Mission/ Commercial Representatives in Sub Saharan Countires*. 2003. Ministry of Commerce and Industry Department of Commerce Government of India.

¹⁶ Padayachee, Vishnu. 2000. *Indian Business in South Africa After Apartheid: Old and New Trajectories* From Comparative Studies in Society and History. Durban: University of Kwazulu Natal.

¹⁷ *Patterns of Africa-Asia Trade and Investment: Potential for Ownership and Partnership*. Oktober 2004. The World Bank Study on Africa-Asia Trade and Investment Relations. Hal. 29.

total nilai ekspor *furniture* ke berbagai negara sebesar RM 7,6 juta, senilai 21,9% merupakan ekspor ke Afrika Selatan.¹⁸

4. Republik Rakyat China (RRC)

Hubungan perdagangan antara RRC dan benua Afrika cukup besar. RRC melakukan transaksi impor untuk komoditi-komoditi tertentu, seperti minyak mentah, emas, platinum, aluminium, tembaga, biji besi, berlian, katun, kayu gelondongan, pulp, udang dan makanan laut, tembakau dan minyak organik.¹⁹

Untuk minyak mentah, RRC sangat mengandalkan pada produksi minyak bumi dari Afrika. Menurut data statistik, sepanjang Januari hingga Oktober 2004, perdagangan antara Asia dan Afrika mencapai lebih dari US\$ 23,12 juta. Nilai ekspor dan impor yang terjadi dalam hubungan dagang itu senilai US\$ 10,98 juta, serta US\$ 12,14 juta. Untuk memacu hubungan ekonomi tersebut agar dapat menciptakan kondisi yang lebih baik, pemerintah RRC mengeluarkan dua kebijakan penting:

- a. *Program for Sino-Africa Cooperation in Economic and Social Development*; dan
- b. *Plan of Addis Ababa Action* yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan pada Januari hingga Oktober 2004.²⁰

Untuk mendukung perkembangan ini, RRC kemudian menindaklanjutinya dengan langkah taktis, yaitu menyiapkan pendirian *Free Trade Areas* (FTA). Konsep *Free Trade Areas* ini dilaksanakan dengan negara-negara yang ada di kawasan Afrika²¹.

5. Australia

Bagi Australia, hubungan ekonomi dengan benua Afrika sangat penting karena dapat mendukung peningkatan devisa negara. Afrika Selatan merupakan mitra utama terbesar Australia di Afrika. Bahkan, negara-negara Afrika termasuk ke dalam 20 besar mitra dagang terbesar Australia di seluruh dunia. Pada akhir 2004, Australia telah mengundang utusan dan perwakilan Afrika Selatan untuk datang ke *Canberra*. Pertemuan itu dirancang untuk mengadakan pertemuan dagang pertama dengan pemerintah Australia. Kemajuan atas pertemuan ini berlanjut pada Maret 2005 yang ditindaklanjuti dengan ditanda-tanganinya kesepakatan kerja sama dalam hal perikanan.

Patut diakui dan ditiru oleh kita bahwa Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) dan misi-misi diplomatiknya yang ditempatkan di negara-negara Afrika aktif mendukung kepentingan bisnis Australia di Afrika, terutama di sektor sumber daya alam, seperti investasi-investasi di bidang energi di Afrika Utara dan Barat. Australia juga memperluas jangkauan perdagangannya di Afrika Barat. Australia lalu mendirikan sebuah komisi dagang yang disebut *High Commission Australia*. Komisi ini ditempatkan di Nairobi untuk mendukung kunjungan diplomatik Australia ke Kenya pada Mei 2005. Tujuan misi ini adalah meningkatkan kepentingan perdagangan multilateral Australia berupa pembuatan

¹⁸ <http://www.matrade.gov.my/matrade/matradeMedia122005.htm>.

¹⁹ *Patterns of Africa-Asia Trade and Investment: Potential for Ownership and Partnership*.

²⁰ <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/statistic/foreigntradecooperation/200407/20040700249030.htm>.

²¹ Maharaj, Raksha. 2004. Asia Business Briefing. (December). Emerging Markets Focus Internet portal Asia Business Briefings.

keepakatan dengan Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Eritrea. Komisi ini juga membuat sebuah *memorandum of understanding* (MoU) dalam kerja sama pertanian dan perdagangan hewan ternak hidup²². Bukti bahwa perhatian Australia sangat besar terhadap kerja sama ekonomi dan perdagangan dapat dibuktikan dari data-data tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Perdagangan Barang Dan Jasa Australia Dengan Kawasan
Pasifik Selatan, Timur Tengah Dan Afrika²³

	Export		Trend Growth 1999-2004	Import		Trend Growth 1999-2004
	2003 \$ million	2004 \$ million		2003 \$ million	2004 \$ million	
Goods^(a) and Services						
New Zealand and Territories	10 561	11 365	6.0%	6 810	6 940	4.1%
Papua New Guinea	1 141	1 269	-2.4%	1 677	1 786	5.2%
Other Pacific Islands	1 736	1 469	-2.6%	1 122	1 219	3.2%
Middle East ^(b)	5 321	5 918	7.2%	4 147	4 731	13.6%
South Africa	1 579	1 870	8.3%	1 427	1 523	12.5%
Other Africa ^(c)	1 359	2 042	6.4%	511	556	0.8%
Total	21 698	23 933	5.1%	15 701	16 598	6.5%

(a) Goods data is on a recorded trade basis.

(b) Excluding Egypt. No services data for 1999.

(c) Including Egypt.

Source: DFAT Stars database and ABS International trade in services by partner country 2004.

Praktik dagang Australia dengan kawasan Afrika sangat terstruktur. Bukti bahwa program bisnis mereka secara terstruktur dan sistematis itu adalah pendirian lembaga khusus yang bernama *The Australia Africa Business Council*. Pendirian lembaga khusus yang berlokasi di Canberra ini agar penanganan masalah kerja sama bilateral di bidang perdagangan dapat dikelola secara profesional. Keseriusan pemerintah Australia menggarap kerja sama bilateral ditindaklanjuti dengan pendirian cabang-cabang lembaga yang sama di semua negara bagian di Australia. Model ini serupa dengan yang ditangani oleh Indonesia ketika membangun kerja sama dengan Australia dengan lembaga bernama *the Australia-Indonesia Business Council* (AIBC) yang berlokasi di Australia, sedangkan *the Indonesia-Australia Business Council* (IABC) yang berlokasi di Indonesia.

Dalam kesehariannya, lembaga profesional bernama *The Australia Africa Business Council* itu memberi banyak kemudahan bagi para pelaku bisnis melalui praktik-praktik berikut:

²² *Annual Report 2004-2005*, Department of Foreign Affairs and Trade. hal. 70-71.

²³ *Ibid.* hal. 63

- a. Melakukan integrasi antara hubungan bisnis kalangan pengusaha Australia ke dalam praktik hubungan perdagangan dan investasi yang sedang berlangsung.
- b. Memberi kemudahan bagi para pelaku bisnis untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan misi dagang; delegasi dagang; penjelasan bisnis; dan komisi-komisi gabungan antarmenteri (*Joint Ministerial Commissions*).
- c. Membuka jaringan dengan perusahaan-perusahaan Australia yang terkemuka, dan lembaga perbankan Australia.
- d. Meningkatkan status *High Commission* (Kedutaan Besar) di Ghana, dan bekerja sama dengan *Austrade* pada pembukaan Konsulat Jenderal baru di Libya sebelum membuka perwakilan diplomatik secara penuh.

6. Thailand

Hubungan Thailand dengan Afrika terjalin terutama dalam hal perdagangan sudah sangat besar. Dalam impornya, Thailand mengimpor emas, aluminium, tembaga, berlian, katun, pulp kimia, udang, dan tembakau²⁴. Untuk memperkuat posisi ekspor ke seluruh dunia, Thailand telah melakukan pembenahan struktural secara intensif di dalam negerinya. Beberapa langkah itu sebagai berikut.

- a. Melakukan *mega-farming*, yakni menyiapkan lahan pertanian dalam jumlah besar, menggantikan manusia dengan mesin, membuat perencanaan dan manajemen produksi yang sistematis. Pada saat yang sama, Thailand menerapkan teknologi tinggi dalam pertanian yang ditunjuang oleh riset dan pengembangan teknologi produksi yang sangat sistematis.
- b. Menggalakkan koperasi petani dalam ukuran kecil untuk memanfaatkan *mega-farming* itu melalui paket-paket penggunaan teknologi permesinan canggih, serta bekerja sama untuk mendapatkan wilayah pemasaran baru. Manfaat kebijakan domestik ini adalah terpadunya antara program yang dirancang oleh pemerintah dan para petani dalam negosiasi perdagangan internasional²⁵.

7. Korea Selatan

Korea Selatan, berbeda dengan Korea Utara, disebut-sebut sebagai negara industri yang menjadi pesaing utama kekuatan industri Jepang. Dalam beberapa tahun belakangan, industri Korea Selatan terus bergeliat dengan melahirkan berbagai produk inovatif, dari mulai perangkat lunak hingga perangkat keras. Perkembangan yang sangat pesat ini terjadi karena adanya keunggulan yang mereka miliki.

Hampir seluruh pengusaha Korea Selatan pun bersemangat untuk melakukan ekspansi ke berbagai negara. Keunggulan ekspor Korea Selatan ini didukung oleh tiga kekuatan yang sekaligus berpadu menjadi satu.

- a. Kualitas diri para pelaku dagang, sebagaimana terbukti dari tingginya kontak di antara 5,3 juta penduduk Korea yang bermukim di luar negeri. Kontak yang berlangsung secara intensif ini berlanjut pada pengembangan aktivitas ekonomi.

²⁴ Ibid.

²⁵ Chareonwongsak, Kriengsak. 2003. *Insights into Thailand's Post-Crisis Economy*. Bangkok: Institute of Future Studies for Development (IFD) and Success Media Co., Ltd. Hal. 26.

Para pengusaha Korea ini terbukti sanggup mengikuti standar hidup di mana mereka berusaha²⁶.

- b. Para pengusaha Korea Selatan mampu berbahasa Inggris dengan sangat baik. Setidak-tidaknya, mereka dapat berkomunikasi dalam salah satu bahasa berikut: Cina, Jepang, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Bagi mereka, pemahaman terhadap “bahasa lokal” akan sangat membantu mereka untuk memahami budaya mitra bisnisnya²⁷. Inilah strategi cerdas yang diterapkan para pengusaha Korea Selatan yang seharusnya ditiru oleh pengusaha Indonesia.
- c. Mereka mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran pemerintahnya. Dukungan penuh diberikan dalam bentuk: 1) bantuan keuangan; 2) keringanan pajak; 3) kemudahan ekspor demi perolehan pasar di luar negeri²⁸.

8. Indonesia

Hubungan antara Indonesia dan negara-negara di Afrika sudah berlangsung cukup lama. Salah satu faktor pendukungnya adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 1955. Konferensi yang fenomenal inilah yang merupakan pendukung utama terkenalnya Indonesia di negara-negara Afrika. Semula, memang, hubungan kerja sama yang terjalin sebatas bidang politik, khususnya berkenaan dengan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Hubungan politik ini dibuktikan oleh pengakuan kedaulatan negara Indonesia dari beberapa negara di Afrika, misalnya, Mesir dan Afrika Selatan.

Lambat laut, hubungan antara Indonesia dan beberapa negara di Afrika itu meluas ke dalam hubungan dagang. Salah satu bukti terjalinnya hubungan dagang antara Indonesia dan Afrika adalah pelaksanaan impor sejumlah komoditas seperti minyak mesin, aluminium, tembaga, katun, pulp kimia, tembakau, dan asam organik. Sayangnya, besarnya impor dari Afrika belum diimbangi oleh ekspor Indonesia ke Afrika. Mengapa? Karena para pengusaha ekspor Indonesia tidak atau belum termasuk ke dalam 20 ekportir terbesar ke Afrika. Lalu, alasan apakah yang menjadikan para pengusaha ekspor Indonesia belum bisa optimal untuk mengeksport produk-produk Indonesia ke kawasan yang sangat potensial ini?

- a. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) terkesan inferior. Bahkan, tidak sedikit, pengusaha Indonesia yang merasa tidak percaya diri (*self-confidence*). Mengapa? Karena ingin menghindari persaingan dagang secara langsung dengan RRC dan India. Itulah sebabnya, semangat mereka masih sebatas ingin membuka pasar baru yang belum terjamah oleh pengusaha RRC dan India. Jelas sekali, ketidak-beranian pengusaha Indonesia untuk bersaing di pasar langsung ini menjadi bukti bahwa mereka tidak
- b. Jalur bisnis Asia-Afrika selama ini belum tergarap dengan baik oleh pengusaha Indonesia dan mitra dagang mereka.

²⁶ Cho, Dong-sung. 1996. 'Overseas Business Ventures'. Dalam Korea Focus on Current Topics. Vol. 4, No. 1 (Jan-Feb). Hal: 125.

²⁷ Yang, Chang-soo. 1997. 'Globalization and Foreign Languages'. Dalam Korea Focus on Current Topics. Vol. 5, No. 1 (Jan-Feb). Hal: 162-3.

²⁸ Lew, Seok-choon. 1997. 'Confucian Capitalism: Possibilities and Limits'. Dalam Korea Focus on Current Topics. Vol. 5, No. 4 (July-August). Hal: 87.

- c. Indonesia belum mampu membidik pasar menengah. Ketidak-mampuan ini terjadi karena pasaran menengah ke bawah telah dikuasai oleh Cina dan India²⁹.

Sebagai contoh kasus sederhana, yang dapat kami ajukan adalah ekspor furnitur produksi Indonesia ke Afrika Selatan. Walaupun produk furnitur ini diakui dan dinilai sangat berkualitas baik di Eropa dan Amerika Serikat, sayangnya, produk furnitur justru sulit sekali menghadapi produk serupa asal RRC yang harganya lebih murah dengan kualitas yang juga baik. Untuk melakukan klarifikasi lebih lanjut tentang apa kami jelaskan ini, kami pernah mewawancarai seorang eksportir meubel asal Jepara. Ia pemilik badan usaha CV Jati Mulya yang kerap kali melakukan ekspor produk furnitur ke Afrika Selatan. Informasi yang kami terima sebagai berikut.

- a. Walaupun kualitas produk furnitur kita lebih baik daripada buatan RRC, Thailand, dan Vietnam, tetapi kami mengalami sulit untuk dapat mengalahkan produk mereka yang bahan bakunya lebih murah. Konon, masih menurut pimpinan CV Jati Mulya ini, bahan baku kayu produk furnitur mereka justru mengandalkan kayu selundupan asal Indonesia. Ironisnya, harga kayu yang diperjual-belikan di dalam negeri justru semakin sulit terjangkau.
- b. Harga jual produk furnitur di Afrika Selatan biasanya lima kali harga asal barang di Jepara. Sekalipun harga berlipat ganda, tetapi keuntungan yang lebih banyak dinikmati justru oleh para whole-sellers, bukan para pengrajin ukiran meubel itu³⁰. Lalu, siapakah yang salah dalam hal ini?

Rekomendasi

Seorang anggota DPRD Provinsi (K) pernah menceritakan pengalamannya saat ia mendampingi delegasi dagang Afrika Selatan ke Provinsi (L) pada 1999. Komunikasi bisnis ini sebenarnya telah terjalin sejak dua bulan terakhir untuk sebuah kunjungan misi dagang selama tiga hari. Lalu, apakah yang terjadi setelah itu? Pada hari pertama kunjungan bisnis itu, misi-delegasi dagang Afrika Selatan ini langsung diterima gubernur untuk mendapat penjelasan yang lebih akurat tentang visi dan misi provinsi itu. Pada hari kedua, misi-delegasi dagang Afrika Selatan dibawa berjalan-jalan untuk mengunjungi daerah wisata di sekitar kota (M). Lalu, mereka dipertemukan dengan para pengurus Kadin tingkat provinsi dan kota untuk mendapat informasi tentang visi dan misi Kadin. Hari ketiga, para anggota delegasi mengunjungi infrastruktur wilayah, yakni sebuah Pasar Induk dan dilanjutkan dengan setengah hari untuk melihat kawasan industri sepatu.

Pada hari kepulangannya, seluruh anggota delegasi dagang ini menyatakan kekecewaannya. Mengapa? Karena mereka, sebenarnya, sangat berharap dapat menjalin hubungan secara langsung dengan pengusaha setempat. Lebih jauh lagi, mereka dapat mengikat kontrak dagang di Provinsi K yang, konon, memiliki sebuah kota yang sangat bersejarah dan sangat terkenal di negaranya. Pimpinan delegasi dagang ini, dalam sebuah kesempatan, membandingkan tentang kepiawaian para pengusaha Republik Rakyat Cina

²⁹ Kompas, 21 April 2005. 'Kadin Fokus Pasar yang Baru di Afrika'.

³⁰ Wawancara penulis dengan Direktur CV Jati Mulya di Jepara, pada tanggal 13 Maret 2006.

(RRC) yang telah menyiapkan sebuah pameran dagang yang dilaksanakan secara khusus untuk menyambut delegasi dagang Afrika Selatan itu. Para pengusaha RRC juga merancang acara khusus untuk dapat mempertemukan mereka dengan para calon eksportir asal Afrika Selatan. Mereka berpandangan, para pengusahalah yang benar-benar menguasai produk yang akan mereka jual daripada para pejabat yang hanya duduk di belakang meja. Seluruh anggota delegasi dagang Afrika Selatan ini, akhirnya, meninggalkan kota Beijing dengan senyuman karena telah mengikat kontrak dagang dengan para eksportir Afrika Selatan. Sikap ini berbeda dengan para pejabat di Indonesia seperti yang telah dijelaskan di awal. Itulah mentalitas birokrat kita yang sebenarnya.

Berpijak pada pengalaman tersebut, terlihat jelas adanya empat hambatan yang belum sepenuhnya dikenali oleh pejabat struktural, baik di Kadin maupun birokrat sendiri sebagai pengambil kebijakan.

1. Perlunya mendirikan sebuah *Indonesia Incorporated* yang beranggotakan pejabat pemerintah dan para pelaku dunia usaha untuk mengembangkan ekspor. Kita harus belajar dari Australia yang sukses mengelola lembaga independen sebagai pendukung ekspornya. Dalam hal ini, Kedutaan Besar RI yang ada di negara-negara di benua Afrika harus meningkatkan prakarsanya dalam upaya mempromosikan produk-produk nasional. Pejabat yang menangani perdagangan diharapkan dapat menyampaikan analisis yang cerdas atas produk-produk unggulan negara lain, tingkat harga dan kualitas produk tersebut di negara setempat. Berdasarkan analisis itu, ia menyarankan strategi penetrasi ekspor dari produk asal Indonesia keluar negeri.
2. Kita juga belum bisa berhasil belajar dari Korea Selatan yang terbukti sukses menggalang ekspor ke seluruh dunia. Kesuksesan ini dilaksanakan melalui tiga strategi: 1) memperlakukan karyawan yang berkualitas dengan sangat baik dan apresiatif; 2) memajukan riset dan pengembangan, serta penggunaan teknologi mutakhir; 3) mengusahakan dukungan dari pemerintah; 4) bekerja sama dengan Serikat Pekerja; 5) memaksimalkan potensi manajer yang berkualitas secara profesional; 6) memberdayakan pimpinan agar mampu dan mau membaca pergerakan industri; 7) dunia usaha agar terus didorong untuk membuat produk baru yang inovatif dan kompetitif; 8) memberdayakan budaya wirausaha (*entrepreneurship*) kepada masyarakat; 9) melakukan diversifikasi bisnis berdasarkan perencanaan strategis; dan 10) terus kreatif dan proaktif untuk mengembangkan pasar di luar negeri³¹.
3. Kita hendaknya belajar cerdas secara sungguh-sungguh dari kesuksesan Korea Selatan dan India yang mampu memanfaatkan kelekatan hubungan individu pemimpin nasionalnya dengan pimpinan di Afrika Selatan.³² Sebenarnya, kita telah memiliki cukup modal awal yang sangat baik, yakni tokoh nasional Afrika Selatan, Nelson Mandela, sebenarnya telah dikenal luas di tanah air. Tanpa diminta sekalipun, tokoh antiapartheid ini senantiasa menggunakan batik dalam semua pertemuannya dengan berbagai kalangan di dalam dan luar negeri. Sayangnya, citra

³¹ Park, Won-bae. 1997. 'Failures of Second-Generation CEOs'. Dalam Korea Focus on Current Topics. Vol. 5, No. 3 (May-June). Hal: 71.

³² Yang, Chang-soo. 1997. 'Globalization and Foreign Languages'. Dalam Korea Focus on Current Topics. Vol. 5, No. 1 (Jan-Feb). Hal: 162-164.

batik yang sebenarnya produk lokal-nasional ini belum marak di kalangan masyarakat Afrika Selatan, padahal, batik lazim digunakan oleh tokoh-tokoh negara ini. Ke depan, alangkah baiknya jika para pelaku bisnis Indonesia mulai merancang sebuah “batik Mandela” untuk dapat dipasarkan secara luas di kawasan Afrika, khususnya Afrika Selatan.

4. Kita juga belum optimal dalam memfasilitasi pameran produk Indonesia di luar negeri. Memang, kalangan pengusaha yang selama ini dibina oleh Asosiasi Meubel Indonesia (ASMINDO) sudah sangat terbantu oleh Badan Promosi Ekspor Nasional (BPEN) yang membiayai hampir sampai 70% promosi ekspor di luar negeri. Namun, mereka masih mengharapkan bantuan pemerintah yang lebih proaktif untuk mempromosikan produk komoditas lainnya lebih lanjut di luar negeri, dan memberikan keringanan dalam biaya ekspor, misalnya menghapus bea-cukai ekspor untuk barang-barang komoditas tertentu³³.

III

STUDI KASUS-3: SETAHUN PERJANJIAN LOMBOK: SEKEDAR KESEPAKATAN ATAU DOKUMEN STRATEGIS?

Hubungan Indonesia dengan Australia yang selama terjalin memang sangat unik. Disebut unik karena hubungan dua negara bertetangga ini bisa diibaratkan dua anak remaja yang bercinta. Hubungan keduanya kerap kali dibumbui oleh gejolak yang meledak-ledak. Namun, tidak lama setelah itu, keduanya membaik kembali dalam waktu singkat. Kita masih ingat perjanjian keamanan pada 1995 lalu. Perjanjian ini dibuat di penghujung kekuasaan pemerintahan Orde Baru dan Partai Buruh. Dokumen perjanjian keamanan ini sangat strategis, dan memiliki bobot yang sangat baik yang mendekati Pakta ANZUS. Pakta ANZUS merupakan traktat perjanjian yang di dalamnya melibatkan Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Naskah ini dibatalkan pemerintah oleh Indonesia pascaketerlibatan Australia dalam kemerdekaan Timor Leste beberapa waktu lalu.

Pada 13 November 2006, di kota Mataram (Lombok), Nusa Tenggara Barat (NTB), pemerintah kedua negara bersepakat untuk menandatangani sebuah perjanjian keamanan yang baru yang dikenal dengan nama Perjanjian Lombok³⁴. Dokumen ini mencakup lahan yang sangat luas, yakni a) pertahanan; b) penegakan hukum; c) pemberantasan terorisme; d) kerja sama intelijen; e) kerja sama maritim; f) keselamatan dan keamanan penerbangan; g) penyebaran senjata pemusnah massal; h) tanggap darurat bencana alam; dan i) pengertian antarmasyarakat dan manusia. Pembahasan teknis atas perjanjian kerja sama ini

³³ Wawancara penulis dengan Direktur CV Jati Mulya di Jepara, pada tanggal 13 Maret 2006.

³⁴ Selengkapnya, perjanjian ini bernama ‘Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation’, dan ditandatangani oleh Dr. N. Hasan Wirayuda yang mewakili pemerintah Indonesia, dan Alexander Downer yang mewakili pemerintah Australia. Naskah ini memuat tujuh (7) halaman, dan berisi sepuluh (10) pasal.

akan dilakukan melalui dialog forum tingkat menteri kedua negara (*Indonesia-Australia Ministerial Forum*).³⁵

Saat kunjungan resminya ke Indonesia pada 6 Maret 2007, Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, menyebut perjanjian yang baru ditandatanganinya itu sebagai langkah pemberian landasan yang kokoh bagi hubungan kedua negara bertetangga ini. Pada saat yang sama, ia juga mengakui bahwa hubungan kedua negara yang berada di jalur pasifik itu akan menghadapi keadaan naik dan turun³⁶.

Hemat kami, pembuatan sebuah kesepakatan yang strategis antara Indonesia dan Australia merupakan sebuah prestasi tersendiri. Disebut demikian karena Australia, harus diakui, merupakan salah satu negara maju yang tentu saja kemajuan melebihi kemajuan negara kita. Australia juga memiliki kredibilitas yang cukup tinggi dan disegani dalam lingkungan pergaulan dunia internasional. Kendatipun demikian, sebuah kesepakatan tidak berarti secara otomatis memberi manfaat bagi rakyat kedua negara. Bagaimanapun, traktat perjanjian itu akan banyak memberi manfaat langsung bagi rakyat kedua negara jika diisi oleh berbagai program nyata yang membawa manfaat jangka panjang bagi pemerintah dan masyarakat kedua negara.

Berkaitan dengan traktat perjanjian antara Indonesia dan Australia itu, kami akan mengkritisi klausul-klausul yang ada di dalam naskah Perjanjian Lombok yang telah berusia setahun itu. Ada tiga hal penting yang harus ditinjau ulang agar posisi negara kita tidak dirugikan.

- a. Kajian atas ada-tidaknya kesetaraan di antara kedua aktor harus dilihat kembali agar kelak tidak menimbulkan masalah baru.
- b. Tinjauan khusus atas pasal 3 yang memuat rincian kerja sama, berikut peluang integrasi kepentingan nasional kita dalam kerangka yang disepakati.
- c. Ajuan pemikiran pada pemerintah Republik Indonesia agar mengubah konstruksi berpikirnya atas Australia. Sikap kritis ini diharapkan dapat membentuk sebuah kritik diri bagi berbagai kalangan di Indonesia, sekaligus sebagai pembelajaran bagi pembuatan dokumen sejenis dengan negara manapun.

IV KITA DAN AUSTRALIA: ANTARA KESETARAAN DAN KETIMPANGAN

Kesetaraan: Hanya pada Tingkat Filosofis

Sebagaimana sudah dijelaskan, perlu ada tinjauan ulang atas naskah perjanjian antara Indonesia dan Australia yang telah disepakati di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelah kami mengamati halaman pertama dokumen kerja sama keamanan itu, memang, ada kesetaraan pada tataran filosofis yang dapat dirunut ke dalam dua belas aspek berikut. Kami berharap,

³⁵ 'Kerjasama Kerangka Keamanan Indonesia-Australia Ditandatangani' dalam <http://lomboknews.wordpress.com/2006/11/13/kerja-sama-kerangka-keamanan-indonesia-australia-ditanda-tangani/>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2007.

³⁶ 'Pertemuan SBY-Downer: Sepakat Perkuat Kerjasama Kontra Terorisme' dalam <http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2007/03/06/1625.html>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2007.

kajian akan mengubah paradigma bahwa kesetaraan yang dimaksud tidak sebatas kesetaraan secara filosofis, tetapi kesetaraan di tataran praktis.

- a. Pernyataan akan kesetaraan kedaulatan masing-masing, iktikad menghormati piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta hasrat untuk hidup secara damai dengan semua masyarakat dan pemerintah di dunia.
- b. Pernyataan atas kedaulatan, kesatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah masing-masing, serta pengakuan atas prinsip bertetangga yang baik, serta sikap tidak akan mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
- c. Pengakuan bahwa keduanya adalah negara yang demokratis dan dinamis, serta berwawasan terbuka di tingkat wilayah masing-masing dan masyarakat-dunia internasional.
- d. Pengakuan akan adanya tantangan global seperti terorisme internasional, serta ancaman tradisional dan nontradisional.
- e. Pengakuan akan pentingnya melanjutkan dan mempertinggi kerja sama dalam upaya menghadapi ancaman terorisme internasional dan kejahatan lintas negara.
- f. Kesiapan bekerja sama untuk menghadapi segala tantangan dan ancaman sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas.
- g. Kesiapan untuk memperkuat kerja sama bilateral dan dialog melalui diskusi teratur atas masalah-masalah strategis, pertahanan, intelijen, penegakan hukum, dan lain-lain.
- h. Kesiapan untuk mempertahankan dan memperkuat kerja sama politik, ekonomi, sosial, dan keamanan bilateral, serta kerja sama menuju stabilitas, kemajuan, dan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik.
- i. Pengakuan atas seluruh kerja sama dan perjanjian bilateral sejak 1959, termasuk dialog dan kerja sama melalui *Indonesia Australia Ministerial Forum* (IAMF).
- j. Penekanan akan pentingnya bekerja sama dalam lingkup keamanan melalui fora regional dan internasional demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan dunia.
- k. Kesiapan untuk mengikuti dan bertanggung jawab atas prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum internasional.
- l. Penghargaan pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara³⁷.

Ketimpangan: Konsistensi Pihak Australia

Pada tataran kebijakan, kita melihat adanya sebuah kecanggihan yang lebih memberat atau lebih berpihak kepada Australia. Sebagaimana termuat dalam *Defence Update 2005*, Australia telah mempraktikkan sebuah angkatan bersenjata yang terintegrasi, terhubung, seimbang, dan dapat disebar dengan sangat cepat ke berbagai kawasan di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan³⁸. Sebaliknya, angkatan bersenjata negara kita tidak atau belum mampu melakukan aksi itu.

Selanjutnya, Australia telah mempraktikkan sebuah *Border Protection Command* (Komando Pengamanan Perbatasan) yang sangat canggih. Sebaliknya, kita mampu

³⁷ Naskah 'Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation'. Halaman 1.

³⁸ Ali, Alman Helvas. 2006. *Operation Astute di Timor Timur: Lesson Learned Bagi Indonesia*. *Quarter Deck*. No. 6. Vol. 1. (Juni). Hal: 4.

melakukan membuat program ini. *Border Protection Command* ini dapat digambarkan sebagai berikut.

- a. Tugas pokok *Border Protection Command* adalah mencegah terjadinya *illegal fishing* (penangkapan ikan secara liar), *people's smuggling* (penyelundupan manusia), dan perlindungan atas infrastruktur lepas pantai seperti rig minyak. Mekanisme ini mampu memantau semua kapal yang antara 48-96 jam akan memasuki perairan Australia, tepatnya menelusuri asal usul kapal, tujuan pelayaran, dokumen yang digunakan, identitas pemilik kapal, awak kapal, berikut rincian muatan kapal tersebut. Operasi yang dijalankan selama ini sudah menjangkau *Christmas Island*, kepulauan yang berdekatan dengan Provinsi Jawa Barat.³⁹
- b. Mekanisme ini melibatkan lima lembaga sekaligus: Angkatan Laut (*Navy*); Pasukan Penjaga Perairan (*Coast Guards*); Kepolisian di Laut dan Penegakan Hukum (*Water Police and Enforcement*); Keamanan Maritim, Keamanan Pelabuhan, Keamanan Perkapalan (*Maritime Security, Port and Ship Security*); serta Bea Cukai dan Penjaga Pantai (*Customs and Coastwatch*). Integrasi lembaga tersebut semakin penting karena Australia sangat mewaspadai aktivitas pelayaran internasional yang terus meningkat, kecenderungan 75% penduduk dunia bermukim di pesisir pada 2025, serta semakin meluasnya kerusakan lingkungan dan terorisme di laut.
- c. Ke depan, Australia sedang merancang sebuah jaringan maritim global yang netral. Jaringan ini tidak akan bergantung pada negara atau perusahaan dari manapun. Ia juga tidak akan mengikat para anggotanya. Tujuan utamanya adalah menjembatani masih adanya perbedaan di tingkat pemahaman dan kecurigaan, termasuk menengahi ketiadaan doktrin, kesenjangan bahasa, perbedaan teknologi, serta komando dan kendali.
- d. Saat ini, Australia sedang menggalang berbagai kerja sama internasional demi terwujudnya koordinasi yang lebih baik. Penggalan kerja sama ini dimaksudkan untuk menghadapi terorisme dan kriminalisme di laut; bantuan kemanusiaan di laut; perlindungan lingkungan hidup; perlindungan dan penyelamatan kapal; serta penyelesaian atas konflik sumber daya alam⁴⁰.

Pada tataran strategis, Australia terbukti mampu melakukan banyak hal yang luar biasa untuk ukuran negara maju sekalipun. Kasus terkini berkaitan dengan masalah ini adalah ketika Australia merespon dengan sangat cepat permintaan bantuan dan dukungan militer dari pemerintah Timor Leste pada 25 Mei 2006. Hanya dalam waktu 24 jam, Australia mampu mengirimkan satuan militer dalam jumlah yang sangat besar. Satuan tempur ini melibatkan berbagai jenis kapal perang sekaligus yang semuanya tiba secara terjadwal. Hingga penghujung 2007 ini, Australia masih menempatkan kekuatan militernya di Irak, Afghanistan, dan Kepulauan Solomon⁴¹.

³⁹ Dalam seminar 'Maritime Security: Challenges and Prospects for Regional Cooperation' pada Sesi I yang berjudul '*Maritime Security Environment in the Asia Pacific: Overview of Recent Developments*', Rear Admiral James Goldrick tidak memberikan makalah. Kegiatan dilakukan pada tanggal 23-24 November 2006 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta.

⁴⁰ Gupta, Manoj. 2006. *Maritime Cooperation?*. Makalah disampaikan dalam Indodefence Conference 2006. Maritime Security: Challenges and Prospects for Regional Cooperation. Jakarta International Expo-Kemayoran. Jakarta, 23-24 November. Hal: 1-6.

⁴¹ Ali, Alman Helvas. 2006. *Operation Astute di Timor Timur: Lesson Learned Bagi Indonesia*. *Quarter Deck*. No. 6. Vol. 1. (Juni). Hal: 4.

Ketimpangan: Tataran kebijakan Indonesia

Apa yang dipaparkan di atas merupakan bahan perenungan kita sebagai negara berkembang bahwa Indonesia harus maju di segala bidang. Masalahnya, dengan kondisi internal dalam negeri seperti yang terjadi sekarang, dapatkah Indonesia mengikuti jejak Australia di bidang diplomasi terkait ekspor komoditas dalam negeri? Dapatkah Indonesia berkembang di bidang teknologi, termasuk teknologi pertahanan dan keamanan? Hemat kami, ada empat kendala yang menempatkan posisi negara kita jauh dari posisi kesetaraan dengan Australia.

Pertama, sektor penguasaan wilayah. Sebagai negara maritim, negara kita ternyata belum kunjung sadar tentang makna pentingnya upaya mempertahankan kedaulatan di darat, laut, dan udara. Kenyataan ini sungguh sangat ironis. Mengapa? Karena di sekitar perairan kita terdapat empat dari sembilan *chokepoints* (perairan strategis yang sempit). Empat dari sembilan *chokepoints* itu adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombai-Wetar⁴².

Kita juga memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni perairan yurisdiksi yang digunakan bagi kepentingan navigasi internasional. Dengan posisi yang sangat vital dan strategis ini, perairan kita merupakan laut penghubung antara kawasan Timur Tengah yang kaya minyak dan kawasan Asia Timur yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, apakah kita sudah mampu untuk memonitor semua potensi ini? Sampai hari ini, kita masih mendengar masalah yang sesungguhnya memperlihatkan kelemahan kita sebagai bangsa maritim, seperti penyelundupan pasir, pencurian ikan, perusakan kekayaan alam bawah laut, dan perompakan kapal yang berujung pada penyanderaan awak kapal. Artinya, kedaulatan kita di bidang maritim masih dapat dikompromikan—untuk tidak menggunakan kata “dikendalikan”—oleh negara lain.

Kedua, sektor belanja militer. Martabat kita sangat rendah di mata Australia. Mengapa? Karena kekuatan persenjataan Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum juga dilengkapi oleh alat utama sistem senjata yang memadai. Sampai 2005, besarnya anggaran pertahanan kita hanya 0,68% dari *Growth Domestic Product* (GDP), atau sedikit di atas Laos (0,42%), negara yang tergolong paling miskin di ASEAN. Sebaliknya, anggota ASEAN lainnya memiliki anggaran pertahanan yang lebih tinggi, seperti Vietnam (6,35%), Brunei (6,00%), Myanmar (5,60%), Singapura (2,59%), Malaysia (2,16%), Thailand (1,91%), Kamboja (1,36%), dan Filipina (1,09%)⁴³.

Dengan anggaran yang kerdil seperti itu, mustahil kekuatan militer TNI akan dapat menyesuaikan diri dengan percepatan yang dilakukan oleh Australia di sektor *sensing, mobility, fire power*, serta *command, control, communication, computer and intelligence (C4I)*. Padahal, persenjataan militer yang dibangun oleh Australia telah berkembang secara cepat, semakin canggih, dan bahkan mematikan⁴⁴. Indikator utamanya adalah teknologi

⁴² *Chokepoints* lainnya adalah: a) Terusan Panama, b) Terusan Suez, c) Selat Bab El Mandeb, dan d) Selat Gibraltar.

⁴³ Djalal, Hasyim. 2006. *Maritime Security in South East Asia: Addressing the Concerns*. Makalah disampaikan dalam Indodefence Conference 2006. Maritime Security: Challenges and Prospects for Regional Cooperation. Jakarta International Expo-Kemayoran. Jakarta, 23-24 November. Hal 20.

⁴⁴ *Sensing, mobility, fire power* dan *C4I* adalah elemen dasar untuk menilai kemampuan operasional suatu sistem senjata dan atau suatu kekuatan militer. Elemen dasar ini digunakan secara meluas di hampir seluruh angkatan bersenjata di dunia.

yang melengkapi *platform* kapal perang, pesawat tempur dan helikopter yang semuanya merupakan teknologi 1990-an⁴⁵.

Posisi pertahanan kita yang sangat memprihatinkan ini sudah lama berdampak pada penurunan kinerja. Sebelum kita melakukan belanja perangkat perang dari Rusia pada 2007 ini, hanya sekitar 25% dari 120 kapal perang TNI AL yang siap beroperasi. Sementara itu, industri pertahanan domestik belum juga mampu melakukan penanggulangan. Ketidakmampuan ini terjadi karena terbatasnya modal, teknologi, dan jaringan internasional. Hal ini sangat terasa saat terjadinya gelombang tsunami yang melanda Provinsi Nangroe Aceh Darussalam pada 2004 lalu. Saat itu, pemerintah yang selama ini masih mengandalkan kekuatan peralatan yang dimiliki TNI terpaksa meminta bantuan negara asing.

Ketiga, sektor perencanaan kerja sama. Kritik semacam ini telah lama disampaikan oleh para petinggi negara sahabat dalam berbagai kesempatan. Menurut mereka, kita terbiasa menggunakan konsepsi yang bukan saja tidak jelas, melainkan juga tidak akurat. Misalnya, para pejabat struktural kita sering menggunakan ungkapan-ungkapan seperti “ingin berdialog secara konstruktif”; “dapat memahami kepentingan mitradialog”; dan “ingin membantu negara lain untuk memelihara keamanan di Asia Pasifik”. Kita juga merasa kesulitan yang sangat kuat ketika harus menyusun sebuah daftar kebutuhan dari rencana kerja sama yang ingin dibangun. “Ketidakmampuan” itulah yang akhirnya menyulitkan negara donor untuk dapat memilah dan memilihnya. Kita juga belum terbiasa menjalankan prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam menangani bantuan luar negeri. Bukankah kita sering mendengar adanya “sunatan massal” atas dana bantuan untuk bencana dari luar negeri? Tindakan segelintir oknum petinggi itulah yang semakin menyulitkan pihak pendonor untuk mempertanggung jawabkan kinerja mereka kepada masyarakat-publik yang menjadi penyumbang dana itu semakin kritis atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh Indonesia.

Kurangnya koordinasi antara TNI dan Departemen Pertahanan RI sangat berdampak pada tidak-jelasnya strategi pertahanan yang dianut. Departemen Pertahanan RI yang berwenang penuh untuk menetapkan seluruh kebijakan pertahanan ternyata belum juga berhasil membuat strategi pertahanan nusantara yang mengikat ketiga matranya (TNI-AL, TNI-AD, dan TNI-AU). Akibat lanjutan yang kemudian terjadi, ketiga angkatan perang itu menjalankan agenda kerjanya sendiri-sendiri, tanpa koordinasi dengan induknya. Sebagai contoh, TNI-AL yang menginduk pada Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) sangat berkewajiban untuk mempertahankan seluruh wilayah nasional, termasuk pulau-pulau kecil sekalipun karena semua pulau itu memiliki nilai yang sangat strategis bagi kedaulatan negara. Sebaliknya, TNI-AD yang berpengalaman dengan Strategi Pulau Besar hanya mengutamakan pertahanan atas pulau-pulau besar semata. Karena miskordinasi, keduanya seringkali berbenturan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Harus masalah ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian?

Kesimpulan: Setara yang Belum Setara

⁴⁵ *Platform* adalah bangunan kapal perang. Kapal perang yang berbeda generasi akan memiliki *platform* yang berbeda pula.

Ketika Australia memiliki konsepsi dan kapabilitas yang terpadu, ternyata negara kita masih juga belum mampu memiliki konsepsi pertahanan yang menyeluruh dan mengikat semua angkatan. Gambaran ini secara tidak langsung pernah dikemukakan oleh Rear Admiral James Goldrick. Dalam tanya jawab yang dilakukannya pascapresentasi, pemakalah mengelak pertanyaan kami untuk secara resmi menilai status Indonesia di mata Australia setelah Perjanjian Lombok seperti yang sudah dijelas di muka. Kami mengajukan tiga identitas, yakni “*ally*” (sekutu), “*semi-ally*” (setengah sekutu), atau sebatas “*friendly country*” (negara sahabat).

Saat tiga identitas itu diajukan secara langsung, James Goldrick tidak memilih salah satu dari ketiga nama itu. Mengapa? Kami tidak mengetahui alasannya. Tetapi, ia bahkan menyebutkan status Indonesia sebagai negara tetangga dengan kesamaan kepentingan nasional⁴⁶. Bagi kami, jawaban ini sangat biasa, tidak jelas, dan membingungkan posisi Indonesia di mata para petinggi Australia.

Bagi kami, sebuah kesamaan kepentingan bukanlah sebuah penamaan yang istimewa yang dapat diberikan kepada negara manapun di dunia ini, terlepas dari kedekatan geografis keduanya. Kita dapat memiliki kesamaan kepentingan dengan RRC dalam urusan perdagangan. Kita juga dapat memiliki kesamaan dengan Afrika Selatan dalam urusan pewarisan semangat Asia Afrika. Bahkan, kita pun boleh jadi “memiliki kesamaan” dengan Israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik sama sekali, namun, memiliki kerja sama erat dalam wisata ziarah. Jadi, Australia hanya akan menganggap penting sebuah kerja sama jika Indonesia, menurut asumsi mereka, benar-benar mampu menjalankan konsepsi pertahanan secara konsisten. Konsistensi itu pun harus disertai oleh kepaduan semua unsur pendukungnya di tingkat TNI dan Departemen Pertahanan RI. Tanpa itu semua, kita akan terjebak pada kerja sama yang semu dengan tingkat pencapaian yang di luar kendali kita sama sekali.

V

PEKERJAAN BESAR DAN PERTIMBANGAN STRATEGIS UNTUK INDONESIA

Pekerjaan Besar

Setelah kami mengamati seluruh isi pasal 3 yang memuat sepuluh bidang kerja sama, kami memberi kesimpulan bahwa, sebenarnya, terdapat banyak peluang yang dapat ditindak-lanjuti oleh kita untuk membuat program implementasinya. Dengan catatan, sebelum program implementasi itu diterapkan, kita harus terlebih dahulu menciptakan sebuah kepaduan di dalam negeri. Jika koordinasi yang padu sudah terkondisikan, barulah sikap bersiteguh untuk menjalin kerja sama dengan Australia yang kapabilitasnya di atas kita bisa dilakukan.

Berkaitan dengan hal itu, ada beberapa catatan kritis yang dapat kami ajukan. Catatan kritis ini berkaitan dengan berbagai sektor yang sudah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

⁴⁶ Dialog dilakukan pada Sesi I dengan tema *Maritime Security Environment in the Asia Pacific: Overviews of Recent Development*, pada Indodefence Conference 2006. Maritime Security: Challenges and Prospects for Regional Cooperation. Jakarta International Expo-Kemayoran. Jakarta, 23 November.

1. Kerja Sama Pertahanan

Masalah yang sangat sensitif sebaiknya harus dilakukan konsultasi secara teratur dan terprogram atas berbagai isu pertahanan dan keamanan yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak, termasuk atas kebijakan pertahanan masing-masing. Sebagaimana diketahui, setiap tahunnya, negara Australia mengeluarkan berbagai dokumen strategis yang terbuka untuk publik seperti *Defence White Paper*, *Defence Review*, *Strategic Review*, serta *Review of Defence Capabilities*.

Masalahnya, apa yang sudah biasa dilakukan oleh Australia itu tidak biasa lakukan. Bahkan, kita pun tidak pernah mengkritisi semua dokumen yang pernah dikeluarkan. Boleh jadi, sebagian besar diplomat pun tidak peduli terhadap masalah ini. Akibat lanjutannya, kita tidak pernah memilah dan memilih beberapa alternatif ke dalam berbagai peringkat dari tataran filosofis hingga tataran praktis, lalu mengevaluasi keterhubungannya dengan kepentingan nasional kita di berbagai kawasan. Di sisi lain, kita juga belum kunjung tiba memiliki panduan pertahanan yang akurat dan berjangka panjang, baik di tingkat Mabes TNI, Departemen Pertahanan RI maupun ketiga angkatan yang ada (AU, AD, AL).

Sungguh sangat ironis karenanya. Bahkan, kekuatan angkatan perang negara kita akan dianggap naif jika tetap mempertahankan kebiasaan *ad-hoc* yang ada selama ini. Kondisi "*ad-hoc*" yang dimaksud adalah baru bersikap kompak setelah melihat masalah di depan mata. Sebaliknya, pemerintah Australia sudah terbiasa melakukan pengkajian interdisipliner atas berbagai kawasan sekaligus. Karena pengkajian yang interdisipliner dan strategis itulah mereka dapat dengan mudahnya mengukur tingkat pencapaiannya. Bahkan, mereka pun mampu mengukur tingkat keterbelakangan kita. Mampukah kita mengukur tingkat keterbelakangan Australia dari kita?

Sebenarnya, kita memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan. Dalam hal ini, kita memiliki akses yang luas untuk meningkatkan pendidikan dan latihan militer, kunjungan belajar, dan pertukaran siswa, termasuk pengenalan berbagai aplikasi metode ilmiah untuk mendukung pembangunan kemampuan itu. Walaupun peluang itu sudah terbuka lebar, kita tetap harus mengkritisi kemampuan kita untuk mengisinya. Dengan kata lain, kita harus memiliki *re-framing* atas kemampuan diri untuk memanfaatkan peluang yang sudah tampak di depan mata itu. Terutama sekali, kita juga harus menyiapkan personil yang tidak saja berkualitas tinggi, tetapi juga mampu berinteraksi dalam bahasa Inggris pada tataran akademis, termasuk terbiasa menggunakan berbagai metode pendidikan dan pengajaran modern yang berbasis teknologi tinggi.

Pada saat yang sama, kita harus meningkatkan kualitas semua lembaga pendidikan, pelatihan, dan pengembangan di lingkungan TNI dan Departemen Pertahanan RI untuk menjawab spektrum tugas yang semakin berat, kompleks, dan berdimesi jangka panjang. Dalam hal ini, kebutuhan atas sebuah kurikulum yang terintegrasi merupakan keniscayaan. Kurikulum itu dikembangkan melalui program peningkatan kualitas pendidikan, kualitas operasional, dan kualitas lulusan. Kurikulum ini juga hendaknya tidak saja sesuai dengan tuntutan zaman, tetapi juga berbasis *e-Learning*. Di dalamnya dikelola oleh personil yang handal, berdedikasi tinggi, dan terbiasa berdialog dengan mitra mereka di luar negeri.

Adanya peluang kerja sama yang sedemikian leluasa di bidang teknologi pertahanan dan kapabilitas pertahanan, desain gabungan, pembangunan, produksi, pemasaran, alih teknologi, dan pembangunan proyek bersama ini harus dimanfaatkan secara cerdas dan

cermat. Bidang ini terkesan sangat netral. Tetapi, sebenarnya, ia sangat strategis untuk pengembangan sektor pertahanan. Mengapa? Karena Australia belum tentu bersedia dengan tulus ikhlas untuk mengalihkan teknologi yang telah dikuasainya. Pada saat yang sama, kita sendiri belum tentu paham dan mampu tentang pengembangan teknologi pertahanan asli Indonesia seperti apakah yang sebenarnya berdaya saing global.

Untuk itu, kita hendaknya segera memetakan riset-riset strategis yang selama ini dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pertahanan (Balitbang Dephan RI). Riset dan pengembangan ini harus dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga strategis di dalam negeri seperti PT PAL, PT LEN, PT INTI, BPPT, Puspitek, serta kampus-kampus yang hirau akan industri strategis bangsa seperti ITB, Unair dan ITS. Kita juga segera melakukan pematenan atas semua karya asli putra-putra terbaik bangsa di bidang pertahanan yang sudah benar-benar berjalan selama ini⁴⁷.

Kalaupun sebuah kerja sama harus terselenggara karena sebuah target politik, pelaksanaan kerja sama itu hendaknya konsisten dengan kebutuhan jangka panjang kita sendiri. Karena itu, sejak dini, kerja sama itu harus melibatkan berbagai aktor domestik yang sudah lama bergerak di tingkat dunia, tanpa perlu lagi menjadikan mereka subkontraktor dari perusahaan Australia. Terlebih lagi, jika kerja sama bilateral ini berpotensi besar untuk dapat menghilangkan kemandirian kita dalam melakukan riset jangka panjang karena terlena oleh berbagai paket hibah maupun alih teknologi yang nyaris kadaluwarsa. Sebagai catatan, industri strategis seperti PT PAL sudah sangat berpengalaman di bidang *platform* kapal seperti pada proyek FPB-57 Nav I hingga Nav V yang kini digunakan oleh TNI AL. Sebaliknya, PT LEN juga telah melakukan riset dan pengembangan untuk membangun sistem elektronika bagi kepentingan militer. Jadi, potensi-potensi inilah yang harus dikembangkan dengan keberpihakan pemerintah yang semakin proaktif.

2. Kerja Sama Penegakan Hukum

Sesuai harapan, akan terjalin konsultasi dan dialog antar pejabat pada semua level guna memerangi kejahatan lintas negara, termasuk memperkuat kinerja lembaga penegakan hukum. Bidang ini melibatkan juga kepolisian kedua negara, karena memasukkan unsur-unsur pencegahan, daya tanggap, dan penelusuran atas kejahatan lintas negara. Adapun bidang-bidang termaksud adalah: a) Penyelundupan dan penjualan manusia; b) Pencucian uang; c) Terorisme keuangan; d) Korupsi; e) Pencurian ikan; f) Kejahatan dunia maya; g) Perdagangan narkoba dan psikotropika; h) Perdagangan senjata, amunisi, bahan peledak, berikut segala produk yang berkaitan dengan itu; serta i) berbagai tipe kriminal yang dianggap penting oleh kedua negara.

Sebelum kerjasama terbentuk, hendaknya kita terlebih dahulu mengembangkan budaya kerja sama diantara TNI dan Polri, yang terkesan kurang optimal pada masa reformasi ini. Patut diakui, keduanya menghadapi budaya organisasi yang baru, keterbatasan sumber daya manusia, serta kelangkaan dana dan teknologi, yang semuanya terjadi akibat merosotnya ekonomi bangsa. Pada tataran konseptual, keduanya

⁴⁷ Perlu dicatat, walaupun kita akan bersinergi pada tataran teknologi tinggi, namun hendaknya tidak menelantarkan berbagai produk unggulan dengan teknologi madya seperti: a) Penggunaan serat rami sebagai bahan baku Pakaian Dinas Lapangan (PDL) yang sudah memenuhi persyaratan teknis, taktis, dan standar ergonomis; serta b) Riset Pesawat Terbang Tanpa Awak (PPTA) yang sudah berkembang pesat, sehingga mulai berfungsi sebagai 'Force Multiplier'.

hendaknya menyepakati terlebih dahulu berbagai definisi yang berkembang seperti *Trans National Crime* (TNC) dan *Trans Organized Crime* (TOC), serta berbagai praktik kejahatan yang mengemuka saat ini seperti: a) *the new dimension of crime*, yakni kejahatan lama dengan menggunakan teknologi baru; b) *the new type of crime*, atau tipe kejahatan yang baru dikenal; c) *organized crime* (kejahatan terorganisir); serta d) *white collar crime* (kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh kelompok intelektual yang berperangkat teknologi canggih).

Sebagai tonggak awal, TNI dan Polri hendaknya bersama-sama menjawab kendala keamanan di wilayah perbatasan. Kendala ini akan terus bermunculan jika mereka kurang dan tidak meningkatkan kualitas koordinasi yang selama ini dilakukan dalam menanggapi hasil-hasil perjanjian bilateral untuk mengatasi TOC. Bagaimana koordinasi yang harus mereka lakukan? Keduanya perlu lebih memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi komunikasi, teknologi informasi, dan teknologi perhubungan, termasuk mewaspadaikan meningkatnya mobilitas penduduk yang memanfaatkan kemudahan lintas batas.

Setelah berhasil melaksanakan berbagai operasi gabungan di dalam negeri secara terstruktur, mereka harus dapat merancang sebuah kerja sama penegakan hukum dengan Australia. Tanpa kualitas koordinasi yang memadai seperti itu, kita hanya akan menerima jasa pelatihan dan konsultasi yang berbasis teknologi tinggi dan serbamahal. Padahal, pelatihan itu belum tentu cocok untuk dipraktikkan oleh TNI dan Polri di dalam negeri.

3. Kerja Sama melawan Terorisme

Isu belakang yang pernah menyita perhatian publik adalah terorisme. Sayangnya, isu dan stigma terorisme diarahkan kepada agama tertentu yang justru semakin memperparah keadaan, khususnya hubungan antarpemeluk agama di Indonesia dan duni internasional. Berkaitan dengan isu terorisme ini, pembahasan ini memuat empat ide sekaligus.

Pertama, kedua negara, baik secara mandiri maupun bersama-sama, akan membasmi terorisme dan ekstrimisme internasional, termasuk akar dan penyebabnya. Kedua negara juga bersepakat untuk menindak tegas para pendukungnya sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Masalahnya, klausul kerja sama pada ayat ini membuka peluang bagi penafsiran sepihak. Mengapa? Karena Australia sudah memiliki basis penelitian dan jaringan kerja sama yang sangat luas dan mendalam, sedangkan kita sebaliknya. Di sisi lain, mereka juga sudah ditopang oleh landasan filosofis dan akademis yang sangat akurat untuk mendukung proposalnya itu dengan landasan itu bisa mementahkan proposal yang kita buat.

Untuk itu, kita hendaknya memperkuat paradigma yang selama ini berlaku bahwa terorisme tidak berhubungan dengan agama manapun. Terorisme terjadi bila berakar pada ketidak-berdayaan sosial dan ekonomi, termasuk kandasnya jalur komunikasi politik. Karena itu, kita hendaknya meningkatkan kualitas koordinasi antara intelijen sipil dan militer. Kita harus membiasakan semuanya bekerja dengan pola operasi yang terukur, dan terikat pada struktur yang diberlakukan di berbagai operasi gabungan.

Kedua, kedua negara harus menyiapkan langkah-langkah pembalasan secara cepat, praktis, dan efektif atas sebuah aksi terorisme. Langkah cepat itu harus memuat petukaran informasi intelijen, bantuan atas keamanan transportasi, imigrasi dan kontrol perbatasan, termasuk membangun kerangka kebijakan melawan terorisme.

Masalahnya, apakah kita bermampuan untuk melakukan itu semua? Mampu tidak mengantisipasi masalah terorisme bergantung pada ada-tidaknya informasi. Karena itu, kita harus lebih dulu membiasakan diri bergerak berdasarkan sebuah bank data intelijen dan peta krisis yang kita buat sendiri. Bank data itu harus memasukkan rancangan sebuah peta intelijen yang dapat dipahami oleh kalangan intelijen sipil dan militer dalam negeri. Di lapangan, strategi ini hendaknya dilanjutkan dengan peningkatan kualitas sinergi berbagai pasukan antiteror yang ada di tingkat angkatan. Dengan strategi itu, mereka dapat bergerak berdasarkan satu komando, dan tidak perlu lagi diperberat oleh berbagai kendala teknis dan taktis. Paket ini akan lebih berdaya jangkau jika melibatkan Detasemen 88 Polri yang selama ini telah mengikuti berbagai pelatihan di dalam dan luar negeri.

Setelah mekanisme tersebut bekerja dengan baik, termasuk kesiapan kita menyiapkan instruktur pasukan antiteror berikut staf intelijen yang khusus mempelajari keamanan transportasi dan kontrol perbatasan, kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan dari Australia. Di sektor inilah, menurut hemat kami, Australia dapat membagikan keahliannya, tanpa perlu ikut campur dalam pembuatan kebijakan antiteror yang kita buat. Alternatif lain, kita bisa memasukkan kebijakan kita ke dalam paradigma yang dianut oleh Australia.

Ketiga, menyangkut perkuatan kerja sama pembangunan kemampuan di bidang penegakan hukum, pertahanan, intelijen, dan keamanan nasional agar secara cepat dapat menanggulangi ancaman terorisme. Kita dapat memanfaatkan klausul-ayat perjanjian ini setidaknya dengan mengundang instruktur dan tenaga didik asal Australia. Bersama arahan dan bimbingan dari instruktur itu, kita bisa melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan, baik dalam institusi sipil maupun militer. Pelatihan ini sebaiknya diakreditasi bersama sehingga memungkinkan lulusannya mengikuti program lanjutan di berbagai negara maju. Dengan kualitas yang baik, para lulusannya pun bisa melatih kader lanjutan di dalam negeri.

Keempat, membuka peluang untuk menanggulangi terjadinya aksi terorisme melalui berbagai tindakan yang cepat dan efektif. Klausul-ayat perjanjian ini memuat penafsiran ganda. Dalam hal ini, pihak yang menawarkan bantuan bertanggung jawab atas seluruh aspek penanganan, pengorganisasian, dan koordinasi. Karena itu, kita hendaknya menyikapi klausul-ayat karet semacam ini secara cerdas dan cermat agar terhindar dari tawaran bantuan yang dapat berujung pada terjadinya pelanggaran kedaulatan negara.

Kondisi semacam ini dapat terjadi jika kita tidak berdaya dalam menyikapi berbagai aksi yang terkesan terorisme, padahal, sebenarnya adalah aksi kriminal biasa yang cukup dihadapi oleh Polri. Untuk itu, TNI dan Polri hendaknya meniadakan kesenjangan persepsi yang selama ini terjadi. TNI dan Polri juga harus bersiteguh dengan aturan yang berlaku seperti UU 2/2002 tentang Polri; UU 3/2002 tentang Pertahanan; UU 34/2004 tentang TNI; UU Darurat 23/1959 dan PP 16/1960; UU Keadaan Bahaya; KUHP; dan UU Pidana Khusus. Jika semua undang-undang tersebut dianggap memiliki kekurangan, kita harus segera menyempurnakannya, bukan mempertentangkannya atau serta-merta menerima tawaran bantuan dari negara lain.

4. Kerja Sama Intelijen

Ranah ini mencakup kerja sama dan pertukaran informasi, serta intelijen atas isu-isu keamanan. Dalam prakteknya, kerja sama ini harus melibatkan berbagai lembaga dan kantor yang terkait sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional

dan sebatas tanggung jawab masing-masing. Sekilas, terbuka peluang kerja sama intelijen di level mikro, seperti di tingkat angkatan, Polri, serta berbagai departemen yang menjalankan fungsi intelijen. Di level makro, kerja sama ini harus melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai pengelola intelijen tertinggi di negara kita.

Masalahnya, mampukah kerja sama ini dilaksanakan tanpa mengganggu stabilitas politik nasional dan kedaulatan negara? Perlu diketahui, negara mitra kita ini adalah negara yang sudah memiliki sistem intelijen yang sangat terintegrasi di tingkat sipil dan militer. Kualitas sistem intelijen mereka pun sangat spesifik, dan sangat mengandalkan teknologi tinggi yang semuanya terhubung dengan pola serupa yang berlaku di negara-negara maju. Dengan kualitas seperti itu, mampukah Australia membagikan pengalaman dan informasi intelijen yang mereka miliki, termasuk informasi intelijen mereka, atas Indonesia yang diperoleh dengan amat susah payah dan sangat mahal itu?

Jawaban atas pertanyaan itu kembali berpulang pada sikap kita. Karena itu, kita harus bersikap proaktif untuk menentukan tingkat kecanggihan manajemen intelijen, informasi intelijen, dan teknologi intelijen seperti apakah yang diharapkan mengalir dari Australia untuk memperkuat keamanan dalam negeri dan kawasan ASEAN? Sekali lagi, penguatan keamanan dalam negeri dan kawasan berpulang pada sikap proaktif Badan Intelijen Negara (BIN). Jujur saja, selama ini, BIN masih mengalami kendala di sektor anggaran dan rekayasa teknologi bagi praktik operasi intelijen. Karena alasan itulah, BIN sulit bergerak leluasa untuk mengantisipasi masuknya persoalan-persoalan intelijen yang bisa merusak keamanan dalam negeri dan kawasan.

Di tengah kendala ini, BIN diharapkan terus meningkatkan kualitas integrasi antarsubstansi di bawahnya. BIN semestinya tidak perlu terjebak oleh masalah anggaran dan rekayasa teknologi sehingga mencegah mereka untuk merancang berbagai aksi sektoral yang sulit ditelusuri. Kebutuhan intelijen yang paling mendesak saat ini adalah melakukan program aksi yang terukur, seperti meningkatkan kualitas kurikulum intelijen di berbagai tingkatan manajemen di lingkungan sipil, TNI dan Polri. Langkah harus segera dilakukan untuk menyikapi terus meningkatnya kerja sama dan koordinasi antarlembaga intelijen di dalam dan luar negeri. Langkah pembenahan juga harus melakukan pembinaan dan penelusuran aparatur intelijen hingga tataran spesialis dan superspesialis, baik pada aspek keorganisasian, operasi, rekayasa teknologi maupun upaya meneruskan prakarsa *human-intelligence* yang sangat diandalkan selama ini.

Sebagaimana disadari, tantangan intelijen modern adalah memenangkan Perang Generasi IV yang melibatkan banyak aktor sekaligus, baik negara maupun nonnegara. Perang Generasi yang dihadapi semakin rumit karena melibatkan sumber daya manusia, ekonomi, dan informasi yang tersebar di seluruh dunia. Dalam konteks kerja sama, memang, terdapat berbagai wilayah yang dapat dimasuki oleh Australia. Namun, jika kita ingin meresponnya, respons itu hendaknya sebatas pengiriman instruktur dan penguatan kurikulum intelijen agar mendekati standar negara maju. Dalam hal ini, kita tidak perlu mengundang mereka untuk mencampuri sistem manajemen intelijen yang berlaku di Indonesia.

5. Keamanan Maritim

Terbuka peluang memperkuat kerja sama untuk meningkatkan keamanan maritim, serta menerapkan aturan-aturan keamanan maritim yang konsisten dengan hukum

internasional. Kita juga harus meningkatkan kerja sama militer dan kerja sama lainnya yang telah ada, serta berbagai pembangunan kapasitas bagi keamanan maritim yang sesuai dengan hukum internasional.

Sebelum melangkah ke muka, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu mawas diri atas praktik maritim yang berlaku selama ini di negara kita. Sesuai dengan *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* (TZMKO), atau Staatsblad 1939 No. 442 yang belum dicabut, pada dasarnya, kita hanya mengakui dua instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di laut, yaitu Jawatan Pelayaran dan Angkatan Laut. Dalam kenyataannya, Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) juga biasa melibatkan sembilan lembaga lainnya seperti: a) Bea Cukai, b) Pariwisata, c) Imigrasi, d) Energi dan Sumber Daya Mineral, e) Departemen Kehutanan, f) Departemen Kelautan dan Perikanan, g) Departemen Kesehatan, dan i) Polri.

Dalam berbagai dialog, semua lembaga tersebut saling meyakini kemampuan masing-masing dalam menjalankan tugas pokok mereka. Lembaga-lembaga itu juga menolak adanya restrukturisasi. Sebenarnya, kerja sama yang dibuat dengan Australia akan lebih mudah terlaksana jika kita melakukan penataan ulang atas 10 perundang-undangan yang terkait dengan keamanan laut. Hasil yang akan diperoleh adalah penyederhanaan pengelolaan laut agar ditangani oleh satu instansi sipil yang namanya akan ditentukan kemudian, dan satu instansi militer, yaitu TNI-AL.

6. Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Sipil

Tataran ini memuat sebuah harapan untuk memperkuat kerja sama dalam bentuk pembangunan kapasitas bagi peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil. Bidang ini sangat penting bagi kita. Mengapa? Karena reputasi penerbangan kita sangat rendah di mata dunia internasional. Kritik terbesar yang sering kita dengar adalah belum adanya integrasi antara radar sipil dan militer. Akibat yang kemudian muncul, kita sering merasa kesulitan untuk mengontrol seluruh wilayah udara nasional.

Dalam mengisi kekosongan ini, terbuka peluang bagi Australia untuk memberikan pelatihan integrasi radar sipil dan militer. Asumsi dasarnya, mereka cukup berpengalaman karena sudah lama mengoperasikan sistem “Jindalee” (*radar over the horizon*) yang dapat memonitor penerbangan sipil dan militer di seluruh wilayah Asia Tenggara. Atas dasar itu, sanggupkah kita menawarkan prakarsa ini kepada Australia? Selain sebuah alih teknologi dan pengalaman, dalam jangka menengah, prakarsa ini dapat membebaskan kita dari cengkeraman *Flight Information Regime* (FIR) yang selama ini dikendalikan oleh Singapura. Jawaban Australia atas prakarsa tersebut, menurut hemat kami, akan menjadi bukti tentang tulus-tidaknnya Australia dalam Perjanjian Lombok ini.

7. Penyebaran Senjata Pemusnah Massal

Teknisnya, klausul-ayat ini mengharamkan kedua negara membangun, menghasilkan, memperoleh, menyimpan, atau menggunakan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya. Untuk tujuan ini, kedua negara bersepakat untuk melakukan kerja sama lanjutan guna mencegah terjadinya penyebaran senjata pemusnah massal, termasuk perangkat pendukungnya, melalui perkuatan kendali ekspor yang sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Kedua negara juga bersepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang nuklir bagi tujuan damai, termasuk pelarangan penyebaran senjata pemusnah massal, serta

memperkuat standar keselamatan dan keamanan nuklir yang sesuai dengan hukum internasional.

Klausul-ayat tersebut, sebenarnya, membuka peluang yang sangat besar bagi keterlibatan Australia dalam pembangunan PLTN di Indonesia, termasuk mekanisme alih teknologi Nuklir bagi keperluan damai. Jika kita mampu memainkan klausul-ayat ini dengan baik, cerdas, dan bernas, sebenarnya, kita akan dapat menjadikan Australia sebagai penjamin bahwa PLTN yang dibangun benar-benar memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh *International Atomic Energy Association* (IAEA). Pemenuhan atas persyaratan yang sangat ketat akan mempermudah pengurusan administrasi. Dengan kata lain, dengan persyaratan itu, kita tidak akan mengalami kendala sebagaimana yang pernah dihadapi oleh Republik Islam Iran.

8. Kerja Sama Darurat

Kerja sama darurat ini mencakup penanggulangan bencana alam dan berbagai hal yang sifatnya darurat. Langkah praktis yang dilakukan adalah berbagai tindakan koordinasi yang sifatnya berhasil guna dan cepat-akurat. Sayangnya, masih ada kendala yang sangat serius dalam ayat ini. Kendala yang dimaksud adalah adanya pernyataan bahwa pihak yang menawarkan bantuan akan bertanggung jawab penuh atas semua urusan pengelolaan tanggap darurat dan penanggulangan bencana. Lebih tepatnya, klausul-ayat ini berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai langkah pembenaran bagi Australia untuk pada masa tertentu, mereka membantu Indonesia ketika terjadinya bencana, sekalipun tanpa diminta bantuan. Bukan sebaliknya, mereka akan segera datang setelah ada permintaan dari pihak Indonesia.

Lalu, langkah terbaik yang sebaiknya dilakukan untuk menghindari terjadinya intervensi atas nama bantuan itu? Setidak-tidaknya, kita dapat mengisi klausul-ayat ini dengan sebuah ajuan, yakni pihak Australia diminta untuk turut serta melakukan survei spasial di Indonesia. Survei ini dilakukan untuk pendataan ulang landasan kontinen atau batas wilayah bencana dengan wilayah lainnya pascaterjadinya bencana alam.

9. Kerja Sama dengan Organisasi Internasional tentang Isu Keamanan Regional

Ruang lingkup yang disepakati berkaitan dengan kerja sama organisasi internasional ini adalah konsultasi dan kerja sama atas masalah-masalah yang merupakan hirauan bersama. Di dalamnya juga bisa memuat permasalahan di bidang-bidang yang berhubungan erat dengan keamanan di Dewan Keamanan PBB, serta badan-badan internasional dan regional lainnya. Namun, kita hendaknya menyadari bahwa klausul-ayat ini bisa mengarah pada penciptaan sebuah koalisi moral yang dapat bergerak pada tataran *high politics* (perang dan damai), serta *low politics* seperti lingkungan hidup, dan isu-isu kesejahteraan umat manusia.

Jika ayat-ayat yang tercantum di dalamnya mengarah pada tataran *high politics*, kita harus segera mengkritiknya untuk diubah. Jika tidak, peluang mereka untuk melakukan intervensi kepada persoalan dalam negeri sangatlah besar. Memang, kerangka perjanjian tersebut netral adanya. Namun, kerangka perjanjian yang ada tetap berpotensi untuk mengundang kritik dari negara-negara kalangan Gerakan Non Blok (GNB). Apa yang akan mereka kritik? Masalah yang pasti dikritik adalah perihal kemandirian negara kita yang dianggap mulai luntur. Padahal, negara kita dinilai menerapkan politik bebas-aktif.

Di sisi lain, klausul perjanjian ini memiliki positif bagi perkembangan kemajuan negara. Nilai positif dari ayat yang dimaksud adalah bahwa kita dapat menjadikan Australia sebagai pintu masuk untuk mengetahui kekompakan negara-negara maju dalam isu-isu global tertentu.

10. Pemahaman Tingkat Masyarakat dan Kerja Sama antar-Penduduk

Klausul-ayat yang ada di dalam perjanjian ini dirancang untuk membangun kontak dan interaksi di kalangan lembaga dan masyarakat masing-masing. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan sikap saling pengertian di bidang keamanan sehingga mampu memahami tantangan yang dihadapi dan menyikapi tantangan itu.

Berdasarkan pemahaman atas tantangan itu, kita dapat segera menyikapinya dengan berbagai langkah praktis. Misalnya, kita segera melakukan identifikasi atas lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat di tanah air yang benar-benar hirau atas terpeliharanya hubungan baik dengan Australia. Kita juga bisa melanjutkannya dengan pemantapan hubungan tingkat kelembagaan. Kegiatan terprogram yang harus dilaksanakan kemudian, antara lain, pertukaran para ahli dan peneliti, penyelenggaraan pelatihan di Australia, melakukan penerbitan bersama, serta penyelenggaraan seminar dan konferensi di kedua negara.

Pertimbangan Strategis untuk Indonesia

Berdasarkan telaah kami atas seluruh isi pasal 3 dari perjanjian ini, terbukti bahwa kita memiliki pekerjaan besar. Pekerjaan besar itu tidak saja terkait dengan keharusan mengisi ruang kerja sama yang tersedia, tetapi bisa lebih mendalam lagi, kita harus mampu membenahi sistem keamanan nasional yang berlaku saat ini.

Idealnya, sebuah kerja sama keamanan yang akan diisi hendaknya benar-benar dirancang untuk menjawab kepentingan nasional. Kita seharusnya juga menempatkan status dan posisi Australia dalam sebuah rancangan besar yang kita buat. Walaupun konsepsi ini masih dalam tataran idealisme, tetapi para pimpinan keamanan di Indonesia hendaknya mampu menjawab sekumpulan pertanyaan riset berikut. Kemampuan mengimplementasikan pertanyaan berikut akan menjadi akses untuk benar-benar menempatkan lokomotif di depan rangkaian gerbong kereta, bukan sebaliknya.

Pertanyaan riset termaksud sebagai berikut.

- a. Sudahkah kita secara akurat membuat sebuah definisi keamanan bagi Republik Indonesia sebagai sebuah *Archipelagic State* yang memiliki wilayah darat, laut, udara, berikut perairan nasional dan Zona Ekonomi Eksklusif?
- b. Jika jawabannya 'Ya', pertanyaan selanjutnya adalah: 'Apakah kebijakan keamanan ini sudah menjangkau spektrum yang paling rendah hingga spektrum yang paling tinggi sesuai dengan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik?'
- c. Jika jawabannya tetap 'Ya', pertanyaan selanjutnya adalah: 'Apakah spektrum tersebut sudah benar-benar akurat dan mampu menyikapi kecenderungan persaingan internasional pada tataran geostrategis dan geoekonomis, termasuk sudah memasukkan posisi dan status Australia dalam peta strategis kita?'

- d. Jika jawabannya masih tetap 'Ya', pertanyaan selanjutnya adalah: 'Apakah dalam berhubungan dengan Australia kita sudah bergerak berdasarkan prinsip-prinsip konstruksi, kewenangan, dan pengorganisasian yang tertata rapi dalam sebuah diplomasi total yang melibatkan seluruh potensi nasional?'
- e. Jika jawabannya masih 'Ya', pertanyaan selanjutnya adalah: 'Apakah rencana strategis itu sudah mencakup penataan aktor pada tataran kebijakan dan tataran operasional?'
- f. Jika masih terdengar jawaban 'Ya', pertanyaan selanjutnya adalah: 'Apakah sudah mencakup penyiapan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan terhadap tindakan para aktor yang terlibat tersebut?'
- g. Jika jawabannya masih tetap 'Ya', pertanyaan terakhirnya adalah: 'Adakah jaminan jika kebijakan ini akan dilanjutkan oleh Mandataris Rakyat (Presiden) terpilih hasil Pemilihan Presiden 2009 nanti dan sesudahnya?'

VI STUDI KASUS-4 PERANG GENERASI IV (FOURTH GENERATION WARFARE): PERSEPSI INDONESIA DAN KEBIJAKAN KE DEPAN

Untuk pertama kalinya, konsep generasi dalam perang digunakan dalam upaya mengidentifikasi perang-perang yang terjadi pada abad tujuh belas. Penekanan penggunaan istilah generasi terutama ditujukan pada aktor dan metode yang digunakan. Sejak saat itu, fenomena perang terus diamati dan dianalisis dari generasi ke generasi berikutnya.

Perang, berdasarkan generasinya, dapat dikategorikan ke dalam beberapa generasi. Perang Generasi Pertama menggunakan strategi berbaris yang rapat untuk mendekati musuh, kemudian melakukan peperangan secara frontal. Artinya, perang generasi pertama masih menggunakan strategi-strategi yang sangat sederhana. Perang generasi pertama didominasi oleh penggunaan manusia dalam jumlah besar.⁴⁸ Perang seperti inilah, misalnya, yang pernah dilakukan oleh Napoleon Bonaparte dalam berbagai aksinya di Eropa hingga ia berhasil menguasai seluruh daratan Eropa saat itu.

Perang Generasi Kedua memiliki pola yang hampir serupa dengan generasi pertama. Hanya saja, generasi kedua menggunakan pola yang lebih dinamis, bergerak dan berhasil memanfaatkan tembakan lurus dan tidak langsung. Misalnya, mereka menggunakan pelontar api. Pola pasukan juga tidak terkumpul di sebuah pasukan sehingga setiap tiap personil bisa bergerak leluasa dan bebas. Pola ini dipakai hingga Perang Dunia I berakhir.

Perang Generasi Ketiga lebih berbentuk dan mengandalkan pada taktik infiltrasi. Cara dilakukan untuk membelah pasukan musuh menjadi dua kelompok dan menjatuhkan mental kekuatan pertempuran lawan. Setelah pasukan musuh terpecah sedemikian rupa, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah bertahan sedalam mungkin. Perang generasi ini banyak digunakan mulai Perang Dunia II hingga 1980an.⁴⁹

⁴⁸ *Armed Forces Journal*, November 2004. Hal: 356.

⁴⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_generation_warfare. Diakses pada 20 Agustus 2007.

Perang Generasi Keempat dimunculkan pertama kali oleh William S. Lind, Keith Nightingale, John F. Schmitt, Joseph W. Sutton, dan Gary I. Wilson pada pertemuan Marinir Amerika Serikat 1989. Perang Generasi Keempat berbeda jauh sekali dengan generasi-generasi sebelumnya yang didefinisikan sebagai setiap perang yang peserta utamanya bukan lagi sebuah negara, tetapi entitas-entitas nonnegara. Entitas-entitas inilah yang digunakan oleh negara untuk menyerang negara lain.

Ciri khas Perang Generasi Keempat ini adalah pengaburan antara perang dan politik, militer dan sipil, perdamaian dan konflik, medan pertempuran dan keselamatan. Perang ini berkhas pada adanya upaya serius untuk menggunakan jaringan, dan menyerang pembuat kebijakan sehingga menghasilkan kerusakan terbesar di bidang ekonomi dan militer. Biasanya, Perang Generasi Keempat hingga kini dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menetralkan pengaruh Amerika Serikat bagi politik dunia yang sering disebut-sebut sebagai *globocop*.⁵⁰

Indonesia dan Perang Generasi Keempat

Jika dikaitkan dengan negara kita, adakah hubungan antara konsep Perang Generasi Keempat dan Indonesia? Disadari atau tidak, Perang Generasi Keempat telah lama dihadapi oleh pemerintah, bangsa, dan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, kita mengenali berbagai masalah yang sangat merusak ketahanan nasional, antara lain, penggalian pasir di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan saat ini. Oleh sebagian pihak, penggalian pasir laut untuk kemudian diekspor ke Singapura ditafsirkan sebagai bagian dari Perang Generasi Keempat Singapura. Demikian pula praktek pembakaran hutan di Kalimantan, termasuk pembalakan liar yang terbukti mengubah patok-patok perbatasan.

Isu terbaru yang di dalamnya memuat stigma atau pencitraan buruk dari kalangan luar atas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sarang teroris juga termasuk ke dalam strategi Perang Generasi Keempat. Dengan pencitraan negatif ini, setiap lalu lintas penduduk WNI yang ke luar negeri, apa pun tujuannya, harus diwaspadai. Pada saat yang sama, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) disusupi untuk bersuara menentang tentang berbagai kasus yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Lantangnya sikap berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atas berbagai masalah Hak Asasi Manusia (HAM) patut diduga sebagai bagian dari strategi Perang Generasi Keempat saat ini.

Harus diakui bahwa, saat ini, upaya membangun demokrasi melalui demokratisasi yang sedang ditangani secara sungguh-sungguh masih berjalan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sudah berusaha sungguh-sungguh untuk membangun citra diri sebagai negara demokratis yang baik. Padahal, pada saat yang sama, Indonesia harus menghadapi “pasukan” Perang Generasi Keempat yang tidak jelas wujudnya, tetapi berusaha merusak citra Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sayangnya, pemerintah NKRI hingga saat ini belum merumuskan langkah-langkah strategis yang terstruktur dan sistematis untuk menghadapi strategi perang yang dibangun oleh angkatan Perang Generasi Keempat ini. Dalam prosesnya, kredibilitas pemerintah telah dan mulai runtuh di dalam dan luar negeri. Hingga kini, masalah-masalah tersebut tidak kunjung selesai, bahkan terus berkembang menjadi duri dalam daging.

⁵⁰ http://www.d-n-i.net/second_level/fourth_generation_warfare.htm. Diakses pada 23 Agustus 2007.

Kesiapan Indonesia, menurut hemat kami, untuk menghadapi strategi perang yang dibangun oleh Generasi Keempat itu hendaknya tidak hanya dilakukan dalam konteks pemerintah, tetapi juga dilakukan untuk menyenangkan para stakeholders di Indonesia. Tingkat kesiapan di tingkat pemerintah sendiri masih terbatas. Terbukti, berbagai departemen seringkali tidak memiliki catatan yang pasti atas aliran masuk investasi ke dalam negeri. Setiap departemen juga tidak mengetahui—karena tidak memiliki database yang akurat—kalangan mana saja yang hutangnya jatuh tempo. Tanpa sistem informasi yang terukur seperti itu, kita tidak akan mampu menghadapi gejolak ekonomi seperti yang pernah terjadi pada 1997 lalu dengan krisis moneter yang “berhasil” merusak sendi-sendi perekonomian nasional.

Di kalangan pelaku dunia usaha dan masyarakat pun terjadi hal serupa. Pada saat yang sama, rendahnya nasionalisme mulai menjangkiti sebagian rakyat kita, lebih-lebih pelaku dunia usaha yang notabene adalah sudah menjadi penduduk dunia. Fakta seringkali menunjukkan bahwa tingkat ekonomi dan pemahaman permasalahan yang terjadi membuat masyarakat dan dunia usaha seringkali gelap mata dan membuat tindakan-tindakan yang justru merugikan Indonesia. Dalam hal ini, aksi jual beli mata uang asing dan pergerakan saham secara tidak rasional mampu melumpuhkan kegiatan ekonomi dalam waktu singkat. Kelumpuhan ekonomi inilah yang akhirnya mengurangi, bahkan menanggalkan, kepercayaan investor atas bangsa Indonesia.

Ajuan Kebijakan Strategis bagi Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut, ada sejumlah ajuan kebijakan strategis yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk menghadapi strategi yang dibangun oleh Perang Generasi Keempat. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut tersusun dalam dua tingkat: kebijakan dan strategi.

Di tingkat kebijakan, pemerintah Indonesia hendaknya segera menyatakan bahwa Perang Generasi Keempat merupakan ancaman nasional. Lalu, pernyataan itu harus ditindak-lanjuti dengan upaya memformulasikannya dalam berbagai kebijakan nasional. Dengan cara ini, kita akan dapat membuktikan bahwa pemerintah benar-benar memahami konsepsi strategi yang dibangun oleh Perang Generasi Keempat secara utuh.

Pemerintah juga harus segera menyusun secara terperinci mulai dari definisi, metoda, aktor, dan mekanisme hingga berbagai indikator tentang Perang Generasi Keempat. Tujuan utama langkah perincian ini agar bisa dijadikan sebagai panduan pemerintah dalam menghadapi gangguan yang mungkin muncul sebagai Perang Generasi Keempat. Untuk keperluan ini, pemerintah harus memiliki sebuah tim yang komprehensif dalam melakukan identifikasi terhadap berbagai masalah yang muncul di Indonesia. Sekali lagi, keterpaduan dan soliditas birokrasi sangat diharapkan ada.

Untuk tingkat strategis, pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan dua strategi berikut. *Pertama*, pemerintah harus meningkatkan semangat kebangsaan dan ketahanan dalam masyarakat. Melalui Departemen Pendidikan Nasional, pemerintah harus sudah mulai memasukkan materi-materi tentang kebangsaan dalam berbagai institusi pendidikan formal dan nonformal. Bekerja sama dengan kalangan perguruan tinggi dan lembaga riset nasional, pemerintah juga harus memprakarsai berbagai diskusi, seminar dan kursus perihal penguatan semangat kebangsaan.

Untuk tujuan itu, tema yang dapat dikembangkan, antara lain, kecintaan tanah terhadap air dalam nuansa kemajemukan sehingga membutuhkan peran-serta seluruh anggota masyarakat. Pada saat yang sama, kita harus menafikan perbedaan sosial ekonomi dan sosial budaya yang ada. Selanjutnya, pemerintah menghidupkan dan memberdayakan lembaga karang taruna sebagai organisasi kepemudaan sehingga lembaga yang saat ini vakum bisa memiliki semangat kebangsaan di dalam organisasi demi terciptanya kepekaan atas berbagai masalah strategis pada tataran global, namun berkembang pada tataran nasional.

Belajar dari pengalaman program Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), pemerintah perlu dan harus memulai memperbanyak pelatihan kewaspadaan nasional. Tema pelatihan yang bisa dipublikasikan seperti “*Mewaspada Perang Generasi Keempat: Tantangan Internasional dan Kesiapan Nasional*”. Kegiatan ini harus melibatkan berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, pelaku ekonomi, dan tokoh masyarakat setempat.

Bagian Ketiga DARI TEORITIS HINGGA PRAKTIS

I AJUAN POLITIK LUAR NEGERI YANG KOMPREHENSIF UNTUK INDONESIA

Menurut hemat kami, sebuah politik luar negeri yang komprehensif, tetapi juga khas Indonesia, memang, membutuhkan persiapan yang sangat panjang. Dalam proses pembentukannya, konsep politik ini menuntut terpeliharanya metode riset yang tepat guna dan terukur. Ia harus senantiasa dikonsultasikan dengan seluruh masyarakat Indonesia agar benar-benar mencerminkan kekhasan Indonesia.

Pada saat yang sama, politik luar negeri ini tidaklah elitis. Ia harus mengakar dan membumi di wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Konsepsi yang akan dibangun bersama ini harus mampu memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat Indonesia yang majemuk. Muatan-muatan konsepnya harus berpihak kepada seluruh penduduk, baik yang tinggal di daratan, pegunungan, maupun di pesisiran, serta di ribuan pulau yang besar dan kecil.

Dalam konteks pembuatan sebuah kebijakan yang komprehensif, kita hendaknya menyikapi segala perbedaan secara objektif. Bagaimanapun, perbedaan pandangan merupakan keniscayaan yang harus disikapi dengan arif. Tidak ada gunanya kita mempertajam perbedaan, terlebih lagi dengan saling menuding siapa yang paling benar dan siapa yang paling berkompeten. Menurut pandangan kami, semua komponen bangsa hendaknya menyadari akan misi amanat reformasi. Semangat yang harus dibangun adalah semangat menerima bahwa sangat terbuka peluang bagi segala kemungkinan kompromi yang tidak mengecewakan pihak manapun sehingga semua agenda reformasi betul-betul terlaksana.

Landasan Hukum

Sebuah kebijakan yang komprehensif, pada hakikatnya, mencakup serangkaian komunikasi dan negosiasi. Konsep kebijakan itu melibatkan integrasi banyak aktor sekaligus. Dalam pelaksanaan kebijakan itu dibutuhkan pemahaman yang sangat spesifik, mulai dari konsepsi pada tataran mikro hingga tataran makro.

Untuk konteks Indonesia, kami mengajukan serangkaian pendalaman tentang konsep kebijakan yang harus dikembangkan sebagai berikut.

1. Politik luar negeri yang komprehensif hendaknya tidak berbenturan dengan undang-undang yang sudah ada, seperti UU No. 3/2002 tentang Pertahanan; UU No. 34/2004 tentang TNI; dan UU No. 2/2002 tentang Polri; UU Darurat No. 23/59; Peraturan Pemerintah No. 16/1960; UU Keadaan Bahaya; KUHP; serta UU Pidana Khusus.
2. Penerapan berbagai undang-undang tersebut selama ini, terbukti, mampu menciptakan dan memelihara situasi yang aman dan kondusif. Kondisi politik yang stabil inilah yang akan dapat mengawal bangsa ini dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, kita harus membangun sinergi melalui perumusan peraturan pelaksanaan tanpa harus membuat undang-undang baru. Dalam hal ini, kita perlu menghindari sebuah undang-undang payung karena hierarki semacam ini tidak dikenal dalam UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Berkaitan dengan masalah keamanan nasional, sesungguhnya, saat ini masih terdapat tujuh belas Program Legislasi Nasional 2004-2009 yang belum terwujud. Bahkan, sebagian besar rancangan itu kurang mendapat perhatian luas. Rancangan undang-undang yang dimaksud sebagai berikut.
 - a. RUU Pertahanan dan Keamanan;
 - b. RUU Perubahan Peradilan Militer;
 - c. RUU Perbantuan TNI;
 - d. RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara;
 - e. RUU Komponen Pendukung Pertahanan Negara;
 - f. RUU Keadaan Bahaya;
 - g. RUU Wajib Militer;
 - h. RUU Pendidikan Kewarganegaraan;
 - i. RUU Pengabdian untuk Pertahanan;
 - j. RUU Bela Negara;
 - k. RUU Hukum Disiplin Prajurit;
 - l. RUU Penggunaan Wilayah Negara;
 - m. RUU Batas Wilayah Negara;
 - n. RUU Rahasia Negara;
 - o. RUU Intelijen Negara;
 - p. RUU Larangan Nuklir;
 - q. RUU Larangan Ranjau Darat.

Landasan Kebijakan

Patut diakui bahwa, ternyata, tidaklah mudah untuk menerjemahkan konsepsi politik luar negeri yang komprehensif ke dalam bentuk undang-undang, terlebih dalam kondisi Indonesia saat ini yang atmosfer ego-sektoralnya sangat terasa. Untuk itu, kita hendaknya mawas diri dan mengedepankan sikap saling memahami bahwa semua rancangan undang-

undang (RUU) hendaknya disikapi bersama melalui tiga kepaduan: konstruktif; kewenangan; dan pengorganisasian.

Perihal konstruksi, kita hendaknya menyadari bahwa negara kita belum memiliki sebuah konstruksi politik luar negeri yang berlaku umum dan konsisten. Terbukti, belum ada satu pun aktor yang benar-benar bertanggung jawab atas sebuah isu, berikut aturan hubungan antarlembagaan yang mewadahnya. Kritik yang berkembang menjelang ratifikasi Perjanjian Keamanan Indonesia-Singapura pada Mei 2007 telah membuktikan bahwa pada tataran domestik, kita belum memiliki sinergi dalam pembuatan sebuah perjanjian internasional. Sebenarnya, kita telah memiliki sebuah kementerian bernama Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Kementerian ini mengoordinasi menteri-menteri bidang politik dan keamanan. Namun sayangnya, Kemenkopolhukam tidak dapat disamakan dengan Dewan Keamanan Nasional sebagaimana yang diberlakukan di Amerika Serikat. Mengapa? Lembaga kementerian itu tidak mempunyai wewenang operasional untuk mengatur aktor-aktor politik dan keamanan lainnya yang berkepentingan dengan terbentuknya sebuah politik luar negeri yang komprehensif.

Perihal kewenangan, kita hendaknya memahami bahwa kewenangan yang tumpang tindih akan memunculkan berbagai masalah yang berkepanjangan. Jika masalah itu berlarut dan tidak segera diselesaikan, dalam jangka panjang, ia pasti berdampak bagi pelaksanaan sebuah politik luar negeri. Dalam menghadapi separatisme di dalam negeri, misalnya, kita masih memperdebatkan batasan keterlibatan TNI dan Polri. Pada saat yang sama, kita juga dipersulit oleh derajat kerja sama yang terjalin antara keduanya di lapangan.

Perihal pengorganisasian, birokrasi di Indonesia selama ini terbiasa dengan pemikiran pembagian lahan. Sebaliknya, aparat birokrat kurang atau, tepatnya tidak, menyadari bahwa semua hal-hwal politik luar negeri telah berkembang sedemikian luas, rumit, canggih, dan mahal. Sebaliknya, negara-negara yang ada di sekitar kita telah melangkah lebih jauh karena mereka mengedepankan konsep *inter-agency* atau lintas lembaga. Modal awal dari *inter-agency* adalah terdapatnya sikap politik pemerintah yang jelas. Mereka memiliki kemampuan manajerial yang sangat tinggi di tingkat elite dan kelembagaan. *Skill managerial* inilah yang membuat mereka mampu menata sebuah konstruksi keamanan nasional. Hemat kami, apabila pemerintah mampu bersikap tegas, pengamanan atas kepentingan nasional dapat dilaksanakan secara terpadu.

Pada masa lalu, walaupun belum sepenuhnya demokratis, namun, pemerintah dulu mampu membuktikan ketegasannya atas semua masalah yang menyangkut keamanan nasional sehingga setiap gejolak yang timbul dapat ditangani secara dini. Dalam periode reformasi saat ini, birokrasi hendaknya mampu bekerja dengan lebih baik dan lebih terorganisir. Aparat birokratis tidak hanya menata lembaga masing-masing, tetapi juga harus mampu menata dan mengelola sebuah Sistem Keamanan Nasional secara bersama-sama.

Landasan Riset Kebijakan

Idealnya, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, sebuah politik luar negeri komprehensif yang akan dibangun bersama ini, dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menjawab sekumpulan pertanyaan riset berikut.

1. Sudahkah kita secara akurat membuat sebuah definisi keamanan bagi Republik Indonesia sebagai sebuah *Archipelagic State* yang memiliki wilayah darat, laut, udara, berikut perairan nasional dan Zona Ekonomi Eksklusif?
2. Jika jawabannya 'YA', pertanyaan selanjutnya adalah: 'Apakah kebijakan luar negeri ini sudah menjangkau spektrum yang paling rendah hingga spektrum yang paling tinggi sesuai dengan kepentingan nasional?'
3. Jika jawabannya tetap 'YA', pertanyaan selanjutnya adalah: 'Apakah spektrum tersebut sudah akurat dan mampu menyikapi kecenderungan persaingan internasional pada tataran geo-strategis dan geo-ekonomis?'
4. Jika jawabannya masih tetap 'YA', pertanyaan selanjutnya adalah: 'Apakah kebijakan luar negeri ini telah menjangkau aspek-aspek konstruksi, kewenangan, dan pengorganisasian?'
5. Jika jawabannya kurang keras, namun tetap terdengar sebagai 'YA', pertanyaan selanjutnya adalah: 'Apakah sudah mencakup penataan aktor pada tataran kebijakan dan tataran operasional?'
6. Jika jawabannya semakin sayup-sayup, namun terdengar seperti 'YA', pertanyaan selanjutnya adalah: 'Apakah sudah mencakup penyiapan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan terhadap tindakan para aktor yang terlibat?'
7. Jika mereka masih menyebut 'YA', pertanyaan terakhirnya adalah: 'Apakah kebijakan ini akan dilanjutkan oleh Mandataris Rakyat (Presiden) yang terpilih pada Pemilihan Presiden 2009 dan sesudahnya?'

Langkah Praktis

Berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance* (tata pemerintahan yang baik), sebenarnya, kita dapat menyusun kerangka etika politik yang terukur. Kerangka etika politik dapat dikembangkan lebih lanjut di kalangan elite pemerintah, dunia usaha, kalangan pendidikan, dan masyarakat luas. Dalam praktiknya, prinsip *good corporate governance* tersebut tidak diterapkan secara mutlak karena kita memiliki kedaulatan untuk menerapkan aturan yang harus sesuai dengan hukum positif Indonesia (UNDP, 2001: 23).

Berikut ini, kami kemukakan sekumpulan etika yang dapat dijadikan renungan oleh kalangan DPR dan pemerintah demi terciptanya hubungan kelembagaan yang lebih baik. Penjabaran dari etika politik tersebut sebagai berikut.

SUSUNAN PRINSIP	PENJABARAN
1. PARTISIPASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pengambilan keputusan atas masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas tanpa perlu menunggu himbauan dari masyarakat. 2. Secara teratur melakukan konsultasi sehingga secara optimal dapat mengevaluasi tingkat pembangunan yang telah dicapai, serta mengantisipasi kemungkinan timbulnya kendala dalam penanganan pembangunan. 3. Seoptimal mungkin melibatkan peran aktif masyarakat dalam

	proses pengambilan keputusan, langsung dan tidak langsung.
2. PENEGAKAN HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sama menjunjung tinggi tegaknya hukum nasional, menghargai hukum dan norma internasional, meniadakan diskriminasi dalam praktik kenegaraan, serta mendukung atas hak asasi manusia yang sesuai dengan hukum objektif yang berlaku di Indonesia, serta sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia. 2. Menindak langsung aparat yang menyalahgunakan wewenang dalam tugasnya.
3. KETERBUKAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun sikap saling percaya dalam hubungan antarpejabat yang bekerja melalui pertukaran informasi dan pemberian informasi yang memadai, serta memudahkan akses untuk memperoleh informasi yang akurat. 2. Secara teratur menyampaikan pada masyarakat luas hasil-hasil pencapaian mereka dalam bidang-bidang yang diprioritaskan dan menjadi kepentingan umum.
4. BERTANGGUNG JAWAB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertinggi kinerja penyelenggaraan negara melalui pelaksanaan hak-hak yang dilindungi undang-undang sehingga tanggap atas segala keluhan, masalah, dan aspirasi masyarakat. 2. Secara teratur melakukan koordinasi kebijakan di tingkat makro dan mikro, serta menjadikan masukan dari masyarakat sebagai perkuatan kinerja.
5. PERSAMAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan peluang yang sama kepada seluruh warga negara-masyarakat tanpa kecuali untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, dan menyediakan perlindungan hukum yang setara. 2. Mempermudah perizinan hingga pelaksanaan investasi asing di Indonesia yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mampu memberdayakan masyarakat luas di Indonesia.
6. VISI STRATEGIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan strategi pembangunan yang tepat-guna yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia untuk jangka panjang, dengan seoptimal mungkin menggunakan potensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia. 2. Melaksanakan pembangunan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dan sebanyak mungkin menggunakan sumber dana dari dalam negeri, serta sumber dana dari luar negeri yang tidak merugikan ekonomi nasional dalam jangka panjang .
7. TEPAT GUNA DAN BERHASIL GUNA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempermudah investasi asing yang benar-benar memberdayakan masyarakat luas di Indonesia. 2. Menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya dengan penggunaan seluruh sumber daya secara optimal dan bijak. 3. Memprioritaskan pembangunan di daerah terpencil dalam rangka memberdayakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada yang hasilnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat umum.
8. PROFESIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berusaha keras meningkatkan kemampuan, keahlian, dan moral para penyelenggara negara sehingga mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menyediakan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan dapat diandalkan.

	2. Menjamin bahwa peningkatan kinerja penyelenggaraan negara akan secara bertahap mengikuti standar yang berlaku di negara-negara maju, dan mampu menggunakan sumber dana nasional yang terbatas secara optimal.
9. AKUNTABILITAS	1. Memberi kesempatan dan peluang kepada masyarakat untuk mengetahui prosedur yang diterapkan bagi terciptanya sebuah kebijakan. 2. Mengundang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pemikiran mereka demi terciptanya kebijakan yang lebih handal dan berdaya jangkau ke depan.
10. PENGAWASAN	1. Melakukan pengawasan secara benar dan ketat atas administrasi publik, dan melakukan pembinaan secara teruji dan tepat-guna dengan melibatkan kalangan masyarakat. 2. Menjamin akan memberikan informasi yang memadai demi terciptanya pengawasan masyarakat yang adil.

II SIAPA DAN MELAKUKAN APA UNTUK INDONESIA?

Untuk menciptakan sinergi antara dunia keilmuan di perguruan tinggi dan praktek pembuatan keputusan di Departemen Luar Negeri, kita harus memiliki forum yang tepat dan pas untuk dapat menjembatani kedua komunitas itu. Kedua institusi itu memiliki saling ketergantungan yang sangat kuat. Kampus mengidealkan terciptanya kurikulum yang mengakar dalam tradisi kebangsaan Indonesia sehingga harus siap mengkaji dan mengkritisi politik luar negeri yang dilakukan pemerintah. Sebaliknya pemerintah sebagai *user* (pengguna, pemakai), dalam hal ini Departemen Luar Negeri RI, berkeinginan kuat untuk mencapai politik luar negeri yang maksimal. Pencapaian situasi perpolitikan yang maksimal harus didahului oleh riset-penelitian yang akurat oleh para akademisi.

Harapan pemerintah, dalam hal ini, semua departemen strategis seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dan Departemen Perdagangan sangat besar untuk dapat memperluas jaringan kerja sama. Bahkan, seluruh departemen yang ada sangat menghargai hasil-hasil riset dan pengembangan yang dilakukan oleh para insan akademisi. Karena itu, munculnya *epistemic community* (EC) menjadi tawaran cerdas yang sangat relevan. Secara umum, *epistemic community* menjadi wadah untuk menjalin kerja sama dengan kalangan profesional. Dengan keahlian dan teori yang dirumuskannya, mereka berkompeten untuk menangani isu-isu tertentu, dan mencari formula yang tepat atas isu-isu tersebut. Dengan teori ilmiahnya, mereka dapat mempertanggung jawabkan keahlian yang mereka miliki tersebut tersebut kepada publik.

Idealnya, EC tersebut dapat dirancang menjadi sumber informasi yang akurat dan saran yang cerdas-aplikatif bagi para akademisi dalam hal pembuatan kebijakan untuk bertukar pikiran. Selanjutnya, EC akan bergerak di tingkat nasional dan internasional. EC juga mendapat tanggung jawab yang memadai untuk menjelaskan posisi negara atas isu tertentu. Lalu, EC akan mensarikan kepentingan negara lain atas Indonesia. Hasil akhirnya adalah formulasi kebijakan nasional yang lebih akurat dan bernas.

Sebenarnya, bentuk kerja sama antara berbagai departemen dan kalangan universitas sudah terjalin baik, selama ini. Namun, kerja sama tersebut masih terbatas pada kerangka makro seperti kuliah umum, praktikum, riset kelembagaan, dan kegiatan-kegiatan seminar lainnya. Padahal, universitas mempunyai banyak ahli *international studies* yang belum diberdayakan dan difungsikan secara maksimal. Karena itu, ke depan, seiring dengan pembentukan *epistemic community*, pengembangan disiplin ilmu diharapkan akan lebih bergairah yang hasilnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pembuat kebijakan (*decision makers*).

Pengamatan yang kami lakukan tentang perkembangan di negara maju seperti Amerika Serikat membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan luar negerinya tersebut dilegitimasi oleh teori-teori atau pemikiran-pemikiran para pakar kompeten yang berada di AS. Paradigma yang paling dominan adalah realisme yang memandang politik sebagai perjuangan untuk mendapatkan *power* dan mengejar terwujudnya kepentingan nasional. Realisme inilah yang kemudian menjadi alat bagi Amerika Serikat untuk merasionalisasi dominasinya dalam kancah hubungan internasional.

Hasrat dominasi atas kekuatan lain, termasuk hasrat untuk menjadi *globocop*, sekalipun tidak dicetuskan secara eksplisit, telah menjadi agenda politik utama luar negeri Amerika Serikat. Bahkan, agenda ini kemudian menjadi studi bagi masalah-masalah hubungan internasional. Dengan dana yang tidak terbatas, negara *superpower* ini mampu melakukan riset berikut aplikasinya yang berkait dengan kebijakan luar negeri. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Amerika Serikat “berhasil” memaksa kekuatan seluruh dunia untuk mengikuti paradigma politik yang dibangun olehnya. Hal inilah yang menjadi masalah yang tidak bisa dihindari karena mereka mempunyai agenda dalam kerangka politik global.

Lalu, bagaimana halnya dengan yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia, saat ini, pemikiran dan analisis masalah-masalah luar negeri merupakan lahan banyak pihak: perguruan tinggi; lembaga riset; media massa; dan departemen-departemen strategis. Kendatipun demikian, pelaksanaan politik luar negeri di tingkat akhir banyak dikendalikan oleh Departemen Luar Negeri RI. Dalam banyak kasus, kebijakan Departemen Luar Negeri RI harus mendahulukan sikap tenggang rasa dengan banyak departemen lain, dan juga pimpinan negara.

Seiring dengan semakin sering munculnya perkembangan isu-isu baru, baik yang bersifat *high-politics* seperti keamanan dan diplomasi; maupun *low-politics* seperti hubungan ekonomi dan sosial budaya, membuat birokrasi Indonesia merasa kesulitan untuk menghadapi perkembangan yang sangat dinamis itu. Bahkan, tidak jarang, kebijakan yang telah dikeluarkan justru ditentang oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Persoalan inilah yang diharapkan dapat diselesaikan oleh *epistemic community* (EC). Tetapi, masalahnya, dapatkah EC memberi masukan bagi pemberian dan pembuatan kebijakan luar negeri di Indonesia yang tepat dan akurat? Menurut hemat kami, berkaitan dengan peran EC tentang masalah kebijakan luar negeri, ditemukan banyak kendala berikut.

1. Kita belum memiliki bank data para pakar *international studies* yang berasal dari spesialis Hubungan Internasional, Ekonomi Internasional, Hukum Internasional dan Ekonomi Politik Internasional yang tersebar di perguruan tinggi, lembaga riset, dan departemen. Pada saat yang sama, kita tidak memiliki informasi mutakhir atas tingkat spesialisasi; level

publikasi; aplikasi riset terakhir; pengalaman riset lintas departemen; berikut kontak mereka dengan mitra di dalam dan luar negeri.

2. Para pakar *international studies* di Indonesia belum memiliki wadah yang padu. Misalnya, berupa sebuah konsorsium untuk melakukan kendali mutu calon pakar, sosialisasi pengetahuan mutakhir, standarisasi kurikulum tingkat sarjana dan pascasarjana, serta penggalangan posisi bersama dalam mendukung masalah strategis bangsa yang sedang terjadi.
3. Kita belum mampu menggerakkan para spesialis yang telah pensiun dan memiliki keahlian khusus (kompeten) di bidang strategis seperti: lingkungan hidup; hak cipta (*copyright*); dan juga studi wilayah. Secara sederhana, kita memiliki banyak spesialis kawasan yang menguasai bahasa, budaya, dan pernah tinggal di kawasan tertentu. Dalam hal ini, para mantan atase militer dan atase teknis dari departemen-departemen tertentu yang memiliki pengetahuan yang tidak ternilai tersebut itu harus dilacak keberadaannya.
4. Kita belum terbiasa melakukan *out-sourcing* atas bidang-bidang yang tidak sensitif seperti pembuatan *country profile*, evaluasi tahunan perkembangan negara asing, serta sejarah hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.
5. Kita juga belum memiliki data yang memadai atas pencapaian diplomatik masa lalu. Contoh klasik yang ideal adalah integrasi Timtim tanpa keributan di Majelis Umum; Kekalahan di ICJ (...) dalam kasus Sipadan dan Ligitan; serta faktor Presiden Soeharto dalam keanggotaan Indonesia dalam APEC. Keterbatasan atas informasi tersebut memaksa kalangan perguruan tinggi mengandalkan informasi tangan kedua bagi pengayaan kurikulum.

III

RENCANA KE DEPAN: EPISTEMIC COMMUNITY KHAS INDONESIA

Sebuah *epistemic community* yang akan mempertemukan para ilmuwan dengan pelaku kebijakan luar negeri hendaknya dirancang dengan asumsi-asumsi berikut.

1. Meskipun kedudukan keduanya adalah saling membutuhkan, namun, Departemen Luar Negeri (Deplu RI) memiliki posisi *primus inter pares*. Mengapa? Karena Deplu RI sangat mengetahui tingkat kebutuhan nasional. Deplu RI juga memiliki akses informasi dan keuangan, serta dapat langsung mempraktekkan pemikiran yang sedang berkembang.
2. Forum ini dirancang untuk melakukan penelitian atas krisis yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Ia juga sekaligus mendukung tercapainya tujuan nasional yang telah dinyatakan dalam naskah pembukaan UUD 1945. Tentu saja, Deplu RI diharapkan sudah mengetahui sepenuhnya tingkat sensitivitas negara dalam menghadapi masalah kedaulatan, pertumbuhan dan pembangunan, pendidikan, serta kesejahteraan berikut segala keterkaitannya dengan dunia luar.
3. Memperbanyak publikasi bersama dan merancang sinergi antara kurikulum perguruan tinggi dan diplomasi yang dijalankan pemerintah Republik Indonesia.

Menurut hemat kami, paradigma yang dihadapi bersama dan harus dikembangkan adalah memahami enam masalah pokok berikut. Bagi kami, enam masalah ini tidak saja harus dipahami, tetapi harus dipraktekkan secara konsisten karena ia telah menjadi masalah merata di seluruh dunia. Keenam pokok masalah itu adalah a) Demokratisasi; b) Hak Asasi Manusia; c) Lingkungan Hidup; d) Liberalisasi ekonomi; e) Hak Cipta; dan f) Terorisme.

Lalu, pendekatan apa yang harus diterapkan untuk menghadapi enam masalah pokok dunia internasional itu? Hemat kami, *pendekatan realisme* sedapatnya digunakan untuk mengkritisi akar permasalahan yang ada. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memahami segala keterbatasan yang dimiliki Indonesia. Setelah itu, tentu saja dengan pemahaman yang benar atas *pendekatan realisme* di atas, kita bisa menggunakan *pendekatan normatif* untuk menempatkan posisi ideal yang perlu ditapaki secara rasional oleh kepemimpinan bangsa kita.

Berikut ini adalah ajuan ide yang dapat dilakukan secara bersama dalam jangka pendek.

1. Kalangan akademisi kampus dapat segera melakukan tabulasi atas hasil-hasil penelitian tingkat magister dan doktoral atas posisi Republik Indonesia dalam menghadapi keenam tema besar tersebut.
2. Kalangan akademisi kampus juga memperbanyak penelitian aplikatif dengan sebanyak mungkin menggunakan Departemen Luar Negeri sebagai narasumber.
3. Kalangan akademisi kampus menangani penelitian dasar seperti pembuatan *country profile*; analisis tahunan atas perkembangan yang terjadi di tertentu; serta matriks ketergantungan Indonesia secara ekonomi, politik, militer dan teknologi atas negara-negara tertentu di dunia.

Pada saat yang sama, Deplu RI membuat sebuah bank data atas keenam masalah besar tersebut melalui dua buah pertanyaan riset.

1. Kondisi apakah yang membuat RI bersikap konsisten dan tidak konsisten? Bagaimana menghadapi perilaku berbagai negara-negara besar dan juga kelompok-kelompok negara yang kepentingannya berlainan dengan NKRI?
2. Deplu RI membuat bank data atas para pakar Indonesia di dalam dan luar negeri yang pernah melakukan tugas diplomatik, menjabat atase teknis, dan juga yang pernah bekerja pada organisasi internasional.
3. Deplu RI harus mengelola sebuah Web-CT yang dikelola secara terbatas untuk dapat berkomunikasi dengan para pakar yang telah terdata tersebut.

Dengan langkah-langkah praktis seperti itu, ke depan, kita diharapkan memiliki *epistemic community* yang handal dan kompeten? Kita berharap, semua disiplin ilmu bisa menyumbangkan pemikiran strategis mereka tanpa egosentrisme sektoral. Kita semua, sebagai warga-bangsa, memiliki tujuan yang sama, yaitu berjuang sekuat tenaga sesuai dengan kompetensi masing-masing untuk menjadikan bangsa Indonesia lebih maju, beradab, dan dihargai oleh masyarakat dunia.